

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan dan orang-orang miskin sudah dikenal dan selalu ada di setiap peradaban dunia. Para pembuat kebijakan pembangunan selalu berupaya agar alokasi sumber daya dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat. Namun demikian, karena ciri dan keadaan masyarakat amat beragam dan bertambah pula dengan tingkat kemajuan ekonomi negara yang bersangkutan yang masih lemah, maka kebijakan nasional pada umumnya diarahkan untuk memecahkan persoalan kelompok ekonomi ditingkat bawah, dengan demikian kemiskinan dapat diamati sebagai kondisi anggota masyarakat yang belum ikut serta dalam proses perubahan, karena tidak mempunyai kemampuan dalam pemilikan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan, oleh karena itu kemiskinan disamping merupakan masalah yang muncul dalam masyarakat bertalian dengan pemilikan faktor produksi, produktifitas dan tingkat perkembangan masyarakat sendiri, juga bertalian dengan kebijakan pembangunan nasional yang dilaksanakan.

Masalah kemiskinan selain ditimbulkan oleh hal yang sifatnya alamiah atau kultural juga disebabkan oleh miskinnya strategi dan kebijakan pembangunan yang ada sehingga para pakar pemikir tentang kemiskinan kebanyakan melihat kemiskinan sebagai masalah struktural (Lincoln Arsyad, 1988, 219).

Kebudayaan manusia pada setiap zamannya tidak lepas dan orang-orang miskin, mulai dari peradaban hingga sekarang ini. Berdasarkan laporan Bank Dunia, pada tahun

1996 penduduk dunia yang hidup di bawah garis kemiskinan dunia adalah 1,19 milyar jiwa lebih. Sebagian besar penduduk miskin dunia tersebut hidup di negara-negara berkembang (di benua Asia bagian selatan dan Afrika Sub-Sahara) sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1.1.

Dua kawasan yang mengalami peningkatan tingkat kemiskinan secara tajam adalah Eropa dan Asia Tengah serta Afrika Sub-Sahara. Pada tahun 1990 jumlah penduduk miskin di Eropa dan Asia Tengah adalah 7,1 juta orang meningkat menjadi 24,0 juta orang pada tahun 1998. Fenomena yang sama terjadi di Afrika Sub-Sahara yang sebetulnya sudah tinggi pada tahun 1990, yaitu 242,3 juta orang menjadi 290,9 juta orang pada tahun 1998.

Kemiskinan bukan hanya masalah di tingkat dunia saja. Indonesia sebagai negara yang masih berkembang juga mengalami masalah ini sejak kemerdekaannya hingga saat ini. Perhitungan jumlah penduduk miskin tingkat nasional dan provinsi di Indonesia telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tiga tahun sekali mulai tahun 1976 berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) modul konsumsi.

Pada tahun 1976 penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan adalah 543 juta atau 40,1%, sementara pada tahun 1996 adalah 22,5 juta atau 11,3% dari total penduduk (lihat Tabel 1.2.). Sampai tahun 1996 penentuan garis kemiskinan sebagai tolak ukur dalam menentukan jumlah penduduk yang miskin masih menggunakan standar lama sehingga belum dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya terutama mengenai cakupan komoditi.

Tabel 1.1.  
Tingkat Kemiskinan Dunia (juta jiwa)

Region	1990	1993	1996	1998
Asia Timur dan Pasifik	452,4 (27,6)	431,9(25,2)	265,1(14,9)	278,3(15,3)
Tidak Termasuk China	92,0(18,5)	83,5(15,9)	55,1(10,0)	65,1(11,3)
Eropa dan Asia Tengah	7,1(1,6)	18,3(4,0)	23,8(5,1)	24,0(5,1)
Amerika Latin dan Caribia	73,8(16,8)	70,8(15,3)	76,0(15,6)	78,2(15,6)
Timur Tengah dan Afrika Utara	5,7(2,4)	5,0(1,9)	5,0(1,8)	5,5(1,9)
Asia Selatan	495,1(44,0)	505,1(42,4)	531,7(42,3)	522,0(40,0)
Afrika Sub-Sahara	242,3 (47,7)	273,3 (49,7)	289,0 (48,5)	290,9(46,3)
<b>Total</b>	1276,4(29)	1304,3(28)	1190,6(25)	1196,9(24)
Tidak termasuk China	915,9(28,1)	955,9(27,7)	980,5 27,0	985,7(26,2)

*Catatan: garis kemiskinan dunia adalah US\$ 1 per hari yang disesuaikan dengan tingkat daya atau purchasing power parity (PPP). Dalam kurung adalah persentase populasi hidup di bawah US\$ 1.*

*Sumber: World Development Report, World Bank, (2000-2001).*

Tabel 1.2.

## Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 1976 - 1999

Tahun	Garis Kemiskinan Rp/Kapita/Bulan		Populasi di bawah Garis Kemiskinan (juta)			Populasi di Bawah Garis Kemiskinan (%)		
	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota+ Desa	Kota	Desa	Kota+ Desa
1995	20.614	13.295	9,4	17,8	27,2	16,8	14,3	15,1
1996	27.905	18.244	8,7	17,2	25,9	13,5	13,8	13,7
1997	38.246	27.413	7,2	15,3	22,5	9,7	12,3	11,3
1998	42.031	31.366	9,6	24,9	34,5	13,6	19,9	17,7
1999	92.409	74, 272	15,7	32, 7	48,4	19,5	26,1	23,5

Sumber: Badan Pusat Statistik (2000). Tanda 1 menunjukkan penggunaan standar dalam tahun 1998.

Sejak Desember 1998 telah digunakan standar baru seperti sebelumnya, standar tersebut juga dinamis, menyesuaikan dengan perubahan pola konsumsi. Namun demikian perbedaan standar 1998 dari standar sebelumnya (1996) lebih dikarenakan oleh perluasan cakupan komoditi yang diperhitungkan dalam kebutuhan dasar, bukan karena pergeseran pola konsumsi. Selain itu, standar baru tersebut juga telah disempurnakan agar dapat dibandingkan antar daerah dengan tingkat harga yang

telah distandarkan pada tingkat harga di DKI Jakarta dan dapat dibandingkan antar waktu dengan menyamakan pendapatan riil dari penduduk referensi (BPS, 2000).

Pada tahun 1990 yang lalu, perhatian masyarakat terhadap masalah kemiskinan kembali digugah setelah cukup lama tidak banyak diperbincangkan di media massa. Perhatian masyarakat tersebut berawal dari pernyataan Bank Dunia (1990) di media massa yang memuji keberhasilan Indonesia dalam mengurangi jumlah penduduk miskin. Menurut Bank Dunia, Indonesia telah berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin secara relatif dari 40 persen pada tahun 1976 menjadi 22 persen dari jumlah populasi pada tahun 1984. Suatu penurunan yang cukup besar hanya dalam kurun waktu 8 tahun. Sementara itu, menurut data dari Biro Pusat Statistik (1991) jumlah penduduk miskin Indonesia tinggal sekitar 15 persen dari jumlah populasi pada tahun 1990.

Namun demikian, secara absolut jumlah penduduk Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan ternyata masih banyak yakni 27,2 juta jiwa. Selain itu, masih banyak penduduk yang pendapatannya hanya sedikit sekali di atas batas garis kemiskinan. Kelompok "nyaris miskin" ini sangat rawan terhadap perubahan-perubahan keadaan ekonomi seperti kenaikan harga komoditi-komoditi utama atau turunnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, masalah kemiskinan ini masih tetap perlu diperhatikan secara serius karena tujuan pembangunan Indonesia adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Sementara itu di dunia ilmiah, masalah kemiskinan ini telah banyak ditelaah oleh para ilmuwan sosial dari berbagai latar belakang disiplin ilmu dengan menggunakan berbagai konsep dan ukuran untuk menandai berbagai aspek dari permasalahan tersebut. Sosiolog maupun ekonom telah banyak menulis tentang

kemiskinan, tetapi istilah seperti “standar hidup”, “pendapatan” dan “distribusi pendapatan” lebih sering digunakan dalam ilmu ekonomi, sedangkan istilah “kelas”, “stratifikasi” dan “marginalitas” digunakan oleh para sosiolog. Bagi yang memperhatikan masalah-masalah kebijakan sosial secara lebih luas biasanya lebih memperhatikan konsep “tingkat hidup”, yakni tidak hanya menekankan tingkat pendapatan saja tetapi juga masalah pendidikan, perumahan, kesehatan dan kondisi-kondisi sosial lainnya dari masyarakat. Namun demikian, sampai saat ini belum ada definisi-definisi yang baku dan bisa diterima secara umum dari berbagai macam istilah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kemiskinan itu sangat kompleks dan pemecahannya pun tidak mudah.

Menurut para ahli Andre Bayo Ala, (1981) kemiskinan itu bersifat *multi dimensional*. Artinya, karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta ketrampilan; dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah.

Selain itu, dimensi-dimensi kemiskinan saling berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti bahwa kemajuan dan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran pada aspek lainnya. Dan aspek lainnya dari kemiskinan ini adalah bahwa yang miskin itu adalah manusianya, baik secara individual maupun kolektif. Kita sering mendengar istilah

kemiskinan pedesaan, kemiskinan perkotaan, dan sebagainya. Namun demikian, bukan berarti desa atau kota an sich yang mengalami kemiskinan, tetapi orang-orang atau penduduk (manusianya) yang menderita miskin.

Oleh karena itu, masalah kemiskinan ini masih tetap relevan dan penting untuk dikaji dan diupayakan penanggulangannya, kalau tujuan pembangunan nasional yang adil dan merata serta terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya ingin dicapai.

Untuk di Propinsi Yogyakarta tercatat penduduk paling banyak di bawah garis kemiskinan berada di daerah Gunung Kidul dengan jumlah total pada tahun 2003 sebanyak 173.800 jiwa, menyusul Bantul dengan jumlah 163.100 jiwa, data selengkapnya pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.3.

Jumlah penduduk miskin dan fakir miskin  
Menurut kabupaten/kota di propinsi DIY 2003

Kabupaten Kota	Penduduk miskin		Garis Kemiskinan (Rp/Kap/bl)	Penduduk fakir miskin		Garis fakir miskin (Rp/Kap/bl)
	Jumlah (000)	%		Jumlah (000)	%	
1	2	3	4	5	6	7
Kulonprogo	91,4	24,35	119,538	29,6	7,90	93,170
Bantul	163,1	20,00	117,244	82,5	10,11	98,166
Gunungkidul	173,8	25,35	117,572	71,0	10,36	96,232
Sleman	159,2	16,93	141,122	78,2	8,32	121,391
Yogyakarta	49,4	12,63	161,846	27,3	6,98	132,846
Propinsi DIY	636,8	19,85	127,089	288,6	9,00	104,625

Sumber : Susenas, Badan Pusat Statistik Propinsi DIY

Tingkat kemiskinan di Prop. DIY ini disebabkan oleh banyak hal seperti yang dipaparkan diatas sehingga penulis tertarik melakukan penelitian untuk menyelesaikan permasalahan ini secara ilmiah, dengan harapan dalam penelitian ini dapat mengungkapkan tingkat kemiskinan untuk mewujudkan hal tersebut. Penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini menjadi sebuah penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 1987-2003”.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Penyerapan Tingkat Tenaga Kerja terhadap Jumlah Penduduk Miskin?
2. Seberapa besar pengaruh Inflasi terhadap Jumlah Penduduk Miskin?
3. Seberapa besar pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Jumlah Penduduk Miskin?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang masalah diatas, maka tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh terhadap Penyerapan Tingkat Tenaga Kerja terhadap Jumlah Penduduk Miskin.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Inflasi terhadap Jumlah Penduduk Miskin.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Jumlah Penduduk Miskin.



#### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Untuk peneliti bisa menambah pengetahuan dan pengalaman dalam meneliti tentang kemiskinan.
2. Untuk pembaca diharapkan bisa mengetahui dan mendapat informasi tentang kemiskinan yang semakin tinggi.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

- Bab I : Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, Rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian.
- Bab II : Tinjauan umum subjek penelitian, memberika keterangan tentang situasi dan kondisi daerah atau wilayah DIY.
- Bab III : Kajian pustaka, memuat tentang penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang digunakan sebagai bahan perbandingan.
- Bab IV : Landasan teori, berisi diskripsi secaa teoritis tentang variabel-variabel ekonomi yang diambil dari literatur-literatur yang relevan.
- Bab V : Metodologi peneletian, mengandung uraian tentang bahan atau materi peletian, alat, jalan penelitian, variabel dan data yang akan dikumpulkan dan analisis hasil.
- Bab VI : Analisis dan pembahasan, berisi tentang semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian dan analisis statistik.
- Bab VII : Simpulan dan implikasi, simpulan berisi tentang simpulan yang langsung diturunkan dari seksi diskusi dan analisis yang dilakukan pada bagian sebelumnya. Sedangkan impliaksi merupakan hasil dari simpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM SUBJEK PENELITIAN**

#### **2.1. Keadaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

##### **21.1. Situasi Wilayah Dan Keadaan Penduduk**

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah penduduk tercatat terakhir pada tahun 2003 sebanyak 3.207.385 jiwa memiliki luas wilayah 185,80 Km<sup>2</sup>, yang berarti berkepadatan 1.025 jiwa per Km<sup>2</sup>. Dan bila dilihat menurut daerah tempat tinggal penduduk yang tinggal di perkotaan lebih banyak dibanding yang tinggal dipedesaan.

Penduduk yang tinggal di daerah perkotaan tercatat sebesar kurang lebih 1.865.169 jiwa atau 55,51 % dan sisanya sejumlah kurang lebih 1.495.179 jiwa atau 44,49 % bertempat tinggal di daerah pedesaan.

Persebaran penduduk perdaerah kabupaten atau kota masih menunjukkan pola yang tidak begitu banyak berubah dari tahun ketahun yaitu jumlah penduduk terbanyak ada di Kabupaten Sleman sebesar 29,25% diikuti berturut-turut Kabupaten Bantul 25,21%, Kabupaten Gunungkidul 21,33%, Kota Yogyakarta 12,47% dan Kabupaten Kulonprogo 11,73% dari total jumlah penduduk propinsi DIY.

Secara administratif wilayah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibagi menjadi empat kabupaten yaitu kabupaten Gunungkidul, Kulonprogo, Bantul, dan Sleman dan satu kota yaitu kota Yogyakarta, dan secara keseluruhan terbagi atas 75 kecamatan, 45 kelurahan dan 393 desa. Berikut adalah rincian lengkap pembagian wilayah administratif tersebut:

Tabel 2.1.

**Kabupaten Kota, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa  
di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001**

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Desa
1.	Gunungkidul	18	-	144
2.	Bantul	17	-	75
3.	Sleman	17	-	86
4.	Kulonprogo	12	-	88
5.	Kota Yogyakarta	14	45	-
	DIY	75	45	393

*Sumber : BPS Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*

Kabupaten Gunung Kidul memiliki 18 kecamatan dan 144 desa, Bantul memiliki 17 kecamatan dan 75 desa, Sleman memiliki 17 kecamatan dan 86 desa, Kulonprogo memiliki 12 kecamatan dan 88 desa sedangkan untuk Kota Yogyakarta memiliki 14 kecamatan dan 45 kelurahan.

Perkembangan jumlah penduduk Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2000 memperlihatkan terjadinya penurunan sekitar 0,05% dari tahun 1999. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh sebagian penduduk atau angkatan kerja mencari pekerjaan di luar daerah. Kamposisi penduduk menurut jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.

## Jumlah Penduduk Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001

No	Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk			
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
1.	Gunung Kidul	365.439	381.012	746.451	22,43
2.	Bantul	382.007	398.170	780.177	23,44
3.	Sleman	423.333	433.225	856.558	25,74
4.	Kulonprogo	216.545	227.274	443.819	13,34
5.	Kota Yogyakarta	258.64	242.308	500.949	15,05
	DIY	1.645.965	1.681.989	3.327.954	100,00

Sumber: BPS Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Persebaran akan kepadatan penduduk yang tersebar di seluruh kabupaten atau kota yang ada di Propinsi DI. Yagyakarta menurut kabupaten atau kota sebagai berikut:

1. Kabupaten Kulonprogo, dengan luas wilayah 586,27 km<sup>2</sup> dan dengan jumlah penduduk 370.290 jiwa, artinya setiap 1 Km<sup>2</sup> terdapat 632 jiwa.
2. Kabupaten Bantul, dengan luas wilayah 50.685 Km<sup>2</sup>, dan dengan jumlah penduduk 795.778 jiwa, artinya setiap 1 Km<sup>2</sup> terdapat 1.570 jiwa.
3. Kabupaten Gunung Kidul, dengan luas wilayah 1.486,36 Km<sup>2</sup> dan dengan jumlah penduduk 453 jiwa, artinya setiap 1 Km<sup>2</sup> terdapat 453 jiwa.
4. Kabupaten Sleman dengan luas wilayah 574,82 Km<sup>2</sup> dan dengan jumlah penduduk 923.131 jiwa, artinya setiap 1 Km<sup>2</sup> terdapat 1.606 jiwa.

5. Kota Yogyakarta, dengan luas wilayah 32,50 Km<sup>2</sup> dan dengan jumlah penduduk 393.700 jiwa, artinya setiap 1 Km<sup>2</sup> terdapat 12.114 jiwa.

Dari di atas tampak bahwa Kota Yogyakarta menduduki urutan pertama dalam kepadatan penduduk dan diikuti selanjutnya oleh Kabupaten Sleman, Bantul, Kulonprogo, dan Gunungkidul. Distribusi penduduk di kabupaten atau kota dewasa ini masih menunjukkan adanya ketimpangan, kota Yogyakarta dengan luas wilayah 32,50 Km<sup>2</sup> atau 1,02% dari luas wilayah DI Yogyakarta berpenduduk 393.700 jiwa atau 12,47 % dari total penduduk DI Yogyakarta. Sedangkan kabupaten Gunungkidul yang luas wilayahnya 1485,36 Km<sup>2</sup> atau hampir separuh wilayah DI Yogyakarta berpenduduk 673.330 jiwa atau 21,33% penduduk DI Yogyakarta.

Tabel 2.3.

Jumlah Penduduk Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1999

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk	Rumah Tangga
1.	Gunungkidul	731.897	150.574
2.	Bantul	767.824	180.741
3.	Sleman	825.589	202.838
4.	Kulonprogo	437.923	87.129
5.	Kota Yogyakarta	559.099	111.861
	DIY	3.326.341	733.173

Sumber : BPS Propinsi DIY

Untuk jumlah rumah tangga di Propinsi DIY ada sebanyak 733.173 rumah tangga, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 1.645.965 Jiwa dan perempuan

sebanyak 1.681.989 jiwa jumlah total penduduk sebanyak 3.327.954 jiwa dan dengan populasi penduduk perempuan lebih banyak dari laki-laki sebanyak 36.024 jiwa.

### 2.1.2. Letak Geografis

Secara geografis, Propinsi DIY terletak di antara :

- 7° 30' sampai dengan 8° 15' lintang selatan
- 110° sampai dengan 110° 52' bujur timur.

Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Magelang.
- Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Klaten dan Wonogiri.
- Sebelah selatan berbatasan dengan samudera Indonesia.
- Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Purwarejo.

### 2.1.3. Topografi

Propinsi DIY mempunyai topografi yang bervariasi dari dataran rendah, perbukitan atau pegunungan sampai dataran tinggi. Berdasarkan klasifikasi tingkat kemiringan tanah di propinsi DIY dibagi menjadi 4 tingkat yaitu:

- 0° sampai 2° meliputi 38,42% (122.396 ha)
- 2° sampai 15° meliputi 24,09% (76.746 ha)
- 15° sampai 40° meliputi 25,31% (80.617 ha)
- 40° ke atas meliputi 12,18% (38.821 ha)

sebanyak 1.681.989 jiwa jumlah total penduduk sebanyak 3.327.954 jiwa dan dengan populasi penduduk perempuan lebih banyak dari laki-laki sebanyak 36.024 jiwa.

### 2.1.2. Letak Geografis

Secara geografis, Propinsi DIY terletak di antara :

- 7° 30' sampai dengan 8° 15' lintang selatan
- 110' sampai dengan 110° 52' bujur timur.

Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Magelang.
- Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Klaten dan Wonogiri.
- Sebelah selatan berbatasan dengan samudera Indonesia.
- Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Purwarejo.

### 2.1.3. Topografi

Propinsi DIY mempunyai topografi yang bervariasi dari dataran rendah, perbukitan atau pegunungan sampai dataran tinggi. Berdasarkan klasifikasi tingkat kemiringan tanah di propinsi DIY dibagi menjadi 4 tingkat yaitu:

- 0° sampai 2° meliputi 38,42% (122.396 ha)
- 2° sampai 15° meliputi 24,09% (76.746 ha)
- 15° sampai 40° meliputi 25,31% (80.617 ha)
- 40° ke atas meliputi 12,18% (38.821 ha)

Tabel 2.5.

## Topografi Kelereng Propinsi DIY

No.	Kabupaten/ Kota	Lereng				Luas (ha)
		0 - 2	> 2 - 15	> 15-40	> 40	
1.	Gunungkidul	28.488	38.998	57.365	23.685	148.536
2.	Bantul	33.102	8.417	6.625	2.541	50.685
3.	Sleman	2.873	0,316	0,061	0	3250
4.	Kulonprogo	34.128	18.192	3.546	1.616	57.482
5.	Kota Yogyakarta	23.805	10.823	13.020	10.979	58.627
	DIY	122.396	76.746	80.617	38.821	318.580
	%	38,42	24,09	25,31	12,18	100,00

Sumber : BPS Propinsi DIY

Berdasarkan letak ketinggian dari permukaan laut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.6.

## Pembagian daerah berdasarkan ketinggian tanah dari permukaan laut di Propinsi DIY

No	Ketinggian (m)	Luas (ha)	Prosen %
1.	0-7	13.582	4,26
2.	> 7-25	20.441	6,42
3.	> 25 - 50	15.671	4,92
4.	> 50 - 100	42.767	13,42
5.	> 100 - 500	208.671	65,50
6.	> 500 - 1000	15.953	5,01
7.	> 1000	1.495	0,47

Sumber : BPS Propinsi DIY



Pada tabel 2.7. dibawah ini memaparkan tentang penduduk di Propinsi DIY menurut klasifikasi kesejahteraan.

Tabel/Table: 2.7.

Jumlah Penduduk menurut Klasifikasi Kesejahteraan dan Kabupateru Kota di  
Propinsi D.I. Yogyakarta  
Number of Population by Welfare Classification and by Regency/City  
in D.I. Yogyakarta Province  
1999-2003

<i>Kabupaten/Kota</i> <i>Regency/City</i>	<i>Tahapan Keluarga Sejahtera /Welfare Family Classification</i>					
	<i>Pra Sejahtera /Pre Welfare</i>			<i>Sejahtera I /Welfare</i>		
	<i>Ekonomi</i> <i>Economics</i>	<i>Bukan</i> <i>Ekonom</i> <i>Not</i> <i>Economics</i>	<i>Jumlah</i> <i>Total</i>	<i>Ekonomi</i> <i>Economics</i>	<i>Bukan</i> <i>Ekonom</i> <i>Not</i> <i>Economics</i>	<i>Jumlah</i> <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Kulonprogo	36,592	9.366	45.948	16.264	11.381	11.381
2. Bantul	21.984	11.700	33.684	21.812	26.625	26.625
3. Gunung Kidul	35.788	15.662	51.450	40.324	27.385	27.385
4. Sleman	18.119	5.187	23.306	35.448	24.962	24.962
5. Yogyakarta	3.131	1.353	4.484	14.323	15.320	15320
<i>Propinsi DIY</i> <i>DIY Province</i>	15.604	43.268	158.872	128.171	105.673	233.844
2002	121.693	46.703	168.396	117.012	110.475	227.487
2001	127.223	46.797	174.020	108.811	108.932	217.743
2000	108.594	47.458	156.052	96.976	105.571	202.547
1999	96,507	59.518	156.025	82.890	96.321	179.211

*Sumber : Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Propinsi D.I. Yogyakarta*

*Source : National Family Planning Coordinating Board D.I. Yogyakarta Province*

dimana pada tabel ini terlihat bahwa jumlah penduduk di Propinsi ini, baik itu pra sejahtera dan sejahtera I dari tahun ketahun khususnya mulai dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 terus bertambah hal ini banyak disebabkan oleh

berbagai faktor salah satunya krisis ekonomi yang menyebabkan inflasi, PDRB perkapita penduduk di Propinsi ini menjadi semakin buruk.

Tabel 2.8.

**Jumlah Penduduk Miskin di Propinsi D.I. Yogyakarta  
1999-2003**

Tahun/Year	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Jumlah (1000)	Penduduk Propinsi from Population of Province	Jumlah (1000)	Penduduk Propinsi from Population of Province	Jumlah (1000)	Penduduk Propinsi from Population of Province
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1999	387,20	25,57	401,90	26,64	789,10	26,10
2000	509,20	33,37	526,01	33,40	1.035,80	33,39
2001	371,89	24,41	395,71	24,65	767,60	24,53
2002	316,09	20,22	319,51	20,12	635,60	20,14
2003	314,20	19,64	322,60	19,95	636,80	19,86

sumber : Badan Pusat Statistik Prop D.I. Yogyakarta

Pada tabel 2.8. terlihat bahwa dari data tersebut walaupun angkanya menurun tetapi jumlah penduduk di Propinsi ini masih tergolong cukup besar dan ini diperlukan perhatian khusus oleh pemerintah daerah untuk memberantasnya.

## 2.2. Tinjauan Ekonomi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

### 2.2.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Laju pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat perkembangan perekonomian suatu daerah. Perkembangan dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi suatu daerah membawa dampak terhadap perubahan struktur perekonomian daerah tersebut. Hal ini misalnya terjadi pergeseran fungsi lahan

pertanian yang diakibatkan semakin meluasnya perkembangan sektor industri yaitu pola perubahan masyarakat dari sektor pertanian menjadi sektor industri.

Kondisi perekonomian Propinsi Daerah Istimewa pada tahun 1997 diwarnai dengan kegelapan. Keadaan ini secara menyeluruh dialami pula oleh propinsi-propinsi lain di Indonesia. Berawal dari depresiasi nilai Rupiah terhadap US Dollar pada perlengkapan tahun, terjadilah krisis ekonomi yang berkepanjangan, bahkan belum selesai hingga akhir tahun.

Walaupun pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun 1997 tidak menunjukkan angka negatif tetapi tetap jauh dari target pertumbuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah yaitu 7,1% pertahun untuk pelita VI, pada tahun ini ekonomi DIY hanya mampu tumbuh 3,52% jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 7,8%, penurunan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup besar ini disebabkan oleh terpuruknya sektor-sektor ekonomi karena krisis, utang luar negeri yang tidak

utang luar negeri yang tidak terbayar pada waktunya, bahan baku impor yang tidak terbeli dan lesunya pasar karena nilai kurs Dollar yang terlalu tinggi.

Pada tahun 1998 kondisi perekonomian DIY ternyata lebih buruk dibandingkan dengan keadaan pada tahun 1997. Dampak krisis ekonomi terhadap perekonomian DIY ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang memperlihatkan angka negatif pada tahun 1998, yaitu sebesar -11,28%. Sementara pada tahun 1997 laju pertumbuhan ekonomi DIY masih menunjukkan angka positif, yaitu 3,53 %. Jadi boleh dikatakan pada tahun 1998 perekonomian DIY benar-benar terpuruk.

Pada tahun 1999 perkembangan ekonomi DIY nampaknya sudah mulai menunjukkan gejala kearah pemulihan ekonomi. Hal ini ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi DIY yang menunjukkan angka positif. Pada tahun 1999 pertumbuhan ekonomi DIY berhasil mencapai angka 1,01%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 1993, 1997, angka pertumbuhan ekonomi DIY tahun 1999 ini memang mengalami penurunan. Pada tahun 1993-1996 sebelum terjadi krisis ekonomi di DIY boleh dikatakan relatif cukup tinggi. Pada tahun 1999 pertumbuhan ekonomi DIY secara sektoral menunjukkan bahwa semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif, kecuali sektor pertanian yang mengalami pelambatan, yaitu dengan laju pertumbuhan -5,75% dan sektor pertambangan dan sektor penggalian yang berkembangnya statis dengan laju pertumbuhan 0,00%. Sementara pada tahun 1998 hampir seluruh sektor ekonomi mengalami pertumbuhan negatif, kecuali sektor listrik, gas, dan air bersih yang masih mampu tumbuh 0,18%. Pada tahun 1999 sektor pertanian sebagai penyumbang-penyumbang terbesar terhadap pembentukan PDRB DIY mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 1999 pertumbuhan sektor pertanian memperlihatkan angka -5,75%, sedangkan pada tahun 1998 walaupun pertumbuhannya negatif, yaitu -5,39% namun masih lebih baik dibandingkan keadaan tahun 1999. Merosotnya pertumbuhan sektor pertanian ini disebabkan subsektor tanaman bahan makanan mengalami pertumbuhan negatif, yaitu -6,2%, padahal subsektor inilah sebagai penyumbang terbesar terhadap sektor pertanian. Di samping itu, subsektor peternakan dan hasil-hasilnya sebagai penyumbang terbesar kedua (setelah subsektor tanaman bahan makanan) terhadap sektor pertanian juga mengalami pertumbuhan negatif yaitu -6,01%. Pada tahun 1999

sektor ekonomi yang pertumbuhannya tertinggi dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya adalah sektor industri pengolahan dengan laju pertumbuhan 3,43%. Padahal tahun sebelumnya mengalami pertumbuhan negatif, yaitu -6,01%. Hal ini karena tetap bertahannya industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang jumlahnya cukup banyak di DIY. Timbulnya ide-ide (kreasi) baru dalam membuat suatu barang kerajinan dengan bahan baku yang mudah diperoleh di daerah sekitar atau dengan memanfaatkan limbah dan barang yang terbuang dari industri lain, menyebabkan usaha industri kecil dan kerajinan rumah tangga di DIY makin berkembang. Apalagi konsumennya tidak terbatas di wilayah DIY saja, bahkan beberapa barang kerajinan produksi Yogya diekspor keluar negeri. Sektor ekonomi yang laju pertumbuhannya menempati peringkat kedua tertinggi sesudah industri pengolahan adalah sektor bangunan dengan laju pertumbuhan sebesar 3,23 %

pada tahun 1999. Sedangkan tahun sebelumnya sektor bangunanlah yang paling terpuruk dibandingkan sektor-sektor lainnya dengan pertumbuhan -32,83%.

Pada tahun 2000 perkembangan ekonomi semakin menunjukkan gejala ke arah pemulihan ekonomi. Hal ini ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan angka positif 4,01%. Sejak 1999 kondisi perekonomian DIY dapat dikatakan menuju ke arah perbaikan, walaupun dengan pertumbuhan di bawah 5%. Pada periode 1999 - 2002, rata-rata pertumbuhan ekonomi DIY sebesar 3,56%, pertahun.

Pada tahun 2001, pertumbuhan ekonomi secara sektoral menunjukkan bahwa semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif, kecuali sektor pertanian dengan laju pertumbuhan -1,60%. Sektor ekonomi yang pertumbuhannya tertinggi dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya adalah sektor pengangkutan dan

komunikasi dengan laju pertumbuhan mencapai 10,39%. Tingginya pertumbuhan sektor ini disebabkan oleh meningkatnya subsektor pengangkutan yang mencapai 10,78%.

Pada tahun 2002, pertumbuhan ekonomi secara sektoral menunjukkan bahwa semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif, kecuali sektor pertanian dengan laju pertumbuhan -5,75%. Pada tahun 2002 sektor ekonomi yang pertumbuhannya tertinggi dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya adalah sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan dengan laju pertumbuhan mencapai 11,03%. Tingginya pertumbuhan sektor ini terutama disebabkan oleh meningkatnya subsektor bank yang mencapai 19,99% dan subsektor sewa bangunan sebesar 10,85%. Sektor ekonomi lain yang juga mengalami pertumbuhan cukup tinggi adalah sektor bangunan dengan pertumbuhan 10,35%, sedangkan sektor pengangkutan dan komunikasi mencapai pertumbuhan dicapai 5% walaupun tidak setinggi kedua sektor di atas.

Pada tahun 2003 tidak terlalu banyak perubahan yang terjadi, jadi hampir sama dengan tahun sebelumnya kecuali sektor bangunan yang paling pesat mengalami pertumbuhan yaitu sekitar 10,32%, dibandingkan dengan sektor-sektor yang lainnya. Dimana sektor ini untuk realisasi pembangunan perumahan oleh Perum Perumnas di DIY sampai dengan 30 Juni 1999 tercatat sebanyak 4.613 unit, yang terdiri dari type rumah inti 38,69% dan rumah sederhana 61,31% dan kumulatif pembangunan perumahan dengan fasilitas kredit dari BTN tercatat sebanyak 17.314 unit dengan nilai kredit sebesar Rp. 91.586,2 juta. Dan pada tahun 30 Juni 1999 tercatat 4.613 unit, untuk kumulatif pembangunan perumahan dengan fasilitas kredit dari BTN tercatat sebanyak 17.314 unit dengan nilai kredit sebesar Rp. 91.586,2 juta. (DIY dalam angka

2000 hal 332) Sedangkan pada tahun terakhir 30 Juni 2001 tercatat sebanyak 4.911 unit rumah, yang terdiri dari rumah sangat sederhana sebesar 5,05%, rumah inti 37,37%, dan rumah sederhana sebesar 57,58% sedangkan pembangunan rumah susun melalui Perum Perumnas di DIY belum terlaksana, sementara itu, kumulatif pembangunan dengan fasilitas kredit dari BTN tercatat sebanyak 17.922 unit dengan nilai kredit sebesar Rp. 100.211.000.

### **2.2.2. Perkembangan PDRB di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

DI Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sumbangan sektor industri terhadap total PDRB untuk tahun 2000 sebesar 16,40 persen. Kontribusi untuk sektor industri ini merupakan urutan ketiga setelah sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan menyusul adalah sektor jasa-jasa. Hal ini menandakan bahwa telah terjadi pergeseran sektor unggulan dari sektor pertanian ke sektor industri, meskipun sektor industri bukan merupakan sektor dominan, tapi memiliki andil yang cukup besar, terutama dalam penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2000 jumlah pekerja yang terserap di sektor industri pengolahan besar dan sedang sebanyak 42.337 orang atau rata-rata 107 orang perusahaan, untuk golongan industri yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah industri tekstil, industri pakaian, industri furnitur, tahu menyusul industri makanan dan minuman, sedangkan untuk jumlah perusahaan Industri Besar dan Sedang (IBS) di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2000 sebanyak 397 perusahaan, meningkat 50 perusahaan (14,41 persen). Selama tahun 2000 sebanyak 11 perusahaan Industri Besar dan Sedang menghentikan usahanya dan 14 perusahaan berubah menjadi industri kecil dengan jumlah tenaga kerja yang kurang dari 20 orang.

Tabel 2.9.

Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Lapangan Usaha  
Tahun 1996-2000 (juta Rupiah)

Lapangan Usaha	1996	1997	1998	1999	2000
Pertanian	795211	822446	865395	817810	901380
Pertambangan dan penggalian	69960	71548	60251	60476	60555
Industri Pengolahan	694724	701976	659816	682440	664115
Listrik, gas dan air bersih	28896	31374	31429	35344	38128
Bangunan	532827	552853	371345	383269	400859
Perdagangan hotel dan Restoran	797939	828299	742580	761008	791621
Pengangkutan dan komunikasi	575293	533459	541280	552812	609593
Keuangan dan jasa Perusahaan	453749	567462	527472	53100	524512
Jasa jasa	1067143	1116950	977631	1000279	1026947
Jumlah	5106349	5286367	4777199	4824446	50177091

Sumber : Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta



### **BAB III**

#### **KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini memuat berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain dan permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti sebelumnya juga pernah dilakukan oleh beberapa peneliti baik itu melalui tesis skripsi, penelitian biasa yang mendasari pemikiran penulis dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan skripsi ini, seperti oleh beberapa peneliti dibawah ini :

- Hasil penelitian Samsubar Saleh (2002) dengan judul Faktor-Faktor Penentu Tingkat Kemiskinan Regional Di Indonesia.

Ada dua model estimasi final yang dipresentasikan dalam penelitian ini. Perbedaan antara dua model estimasi tersebut terletak pada penggunaan variabel penjelas HDI. Model estimasi pertama adalah dengan menggunakan komponen-komponen HDI sebagai variabel-variabel penjelas. Di lain pihak, model estimasi kedua menggunakan indeks komposit HDI sendiri sebagai variabel penjelas.

Berdasarkan hasil-hasil empirik dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan per propinsi di Indonesia adalah indeks pembangunan manusia, investasi fisik pemerintah daerah, tingkat kesenjangan pendapatan, populasi penduduk dan krisis ekonomi.

- Hasil penelitian Syamsul Amar (2002) dengan judul Kajian Ekonomi Tentang Kemiskinan Di Pedesaan Propinsi Sumatra Barat.

Ada dua metode atau langkah yang dilakukan yaitu dengan dengan penentuan sampel desa dan penentuan sampel rumah tangga. Langkah yang pertama

adalah penentuan sampel desa dilakukan atas tiga tahap (*multi stage*) yaitu: penentuan sampel kabupaten, sampel kecamatan dan sampel desa. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, terpilih dua kabupaten, delapan kecamatan dan empat puluh desa sebagai sampel penelitian. Disisi lain penentuan sampel rumah tangga dilakukan dengan Model Alokasi Neyment (1983 : 350). Dan menggunakan data pendapatan rumah tangga tahun 1991 yang diperoleh dari Kantor Statistik Sumatera Barat. Dengan model tersebut diperoleh ukuran sampel sebesar 760 rumah tangga. Berdasarkan hasil empirik ini, dapat disimpulkan bahwa kemiskian bukan fenomena yang berdiri sendiri, tetapi terkait dengan beberapa faktor baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal terdiri dari tingkat pendidikan, tingkat kesehatan. Disisi lain faktor eksternal luas penguasaan lahan dan teknologi.

## **BAB IV**

### **LANDASAN TEORI**

Para pembuat kebijakan pembangunan selalu berupaya agar alokasi sumberdaya dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat. Namun demikian, karena ciri dan keadaan masyarakat sangat beragam dan ditambah pula dengan tingkat kemajuan ekonomi negara yang bersangkutan yang masih lemah, maka kebijakan nasional umumnya diarahkan untuk memecahkan permasalahan jangka pendek. Sehingga kebijakan pemerintah belum berhasil memecahkan persoalan kelompok ekonomi di tingkat bawah. Selain itu, menurut (Fredericks, 1985), kebijakan dalam negeri seringkali tidak terlepas dengan keadaan yang ada di luar negeri yang secara tidak langsung mempengaruhi kebijakan antara lain dari segi pendanaan pembangunan.

Selo Sumardjan, (1980) kemiskinan dapat diamati sebagai kondisi anggota masyarakat yang tidak/belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan, baik kemampuan dalam pemilikan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan. Ketidak ikut sertaan dalam proses pembangunan ini dapat disebabkan karena secara alamiah tidak/belum mampu mendayagunakan faktor produksinya, dan dapat pula terjadi secara tidak alamiah. Pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk berpartisipasi berakibat manfaat pembangunan tidak menjangkau mereka.

Oleh karena itu, kemiskinan di samping merupakan masalah yang muncul dalam masyarakat bertalian dengan pemilikan faktor produksi, produktivitas dan tingkat perkembangan masyarakat sendiri, juga bertalian dengan kebijakan pembangunan nasional yang dilaksanakan. Dengan kata lain, masalah kemiskinan ini bisa selain ditimbulkan oleh hal yang sifatnya alamiah/kultural juga disebabkan oleh miskinnya strategi dan kebijakan pembangunan yang ada, sehingga para pakar pemikir tentang kemiskinan kebanyakan melihat kemiskinan sebagai masalah struktural. Dan pada akhirnya timbul istilah kemiskinan struktural yakni kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat tersebut tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.

#### **4.1. Ukuran Kemiskinan**

Kemiskinan mempunyai pengertian yang luas dan memang tidak mudah untuk mengukurnya. Namun demikian, dalam bagian ini akan dijelaskan 2 macam ukuran kemiskinan yang umum digunakan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.

##### **4.1.1. Kemiskinan Absolut**

Todaro, (1987) pada dasarnya konsep kemiskinan dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara baik. Bila pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan minimum, maka orang dapat dikatakan miskin. Dengan demikian, kemiskinan diukur dengan memperbandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum

merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin atau sering disebut sebagai garis batas kemiskinan. Konsep ini sering disebut dengan kemiskinan absolut. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup.

Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga oleh iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan berbagai faktor ekonomi lainnya. Walaupun demikian, untuk dapat hidup laik seseorang membutuhkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya.

#### **4.1.2. Kemiskinan Absolut Global**

Kemiskinan bisa didefinisikan menurut dua pendekatan; kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut diukur dengan suatu standar tertentu, sementara kemiskinan relatif bersifat kondisional, biasanya membandingkan pendapatan sekelompok orang dengan pendapatan kelompok yang lain dalam masyarakat. Sub bab ini akan melihat lebih dalam pada konsep kemiskinan absolut (Abdul Hakim, 2002, 211-212).

Kemiskinan absolut adalah kondisi seseorang (atau keluarga) yang pendapatannya kurang dari pendapatan yang bisa mencukupi berbagai kebutuhan dasar berupa makanan, pakaian, dan perumahan (di beberapa negara ditambah dengan kebutuhan dasar khas setempat). Karena berbagai tambahan tersebut, tingkat kemiskinan absolut di satu negara bisa berbeda dengan tingkat kemiskinan absolut di negara lain, sehingga sulit untuk membuat perbandingan antar negara tersebut.

Definisi kemiskinan absolut juga bervariasi menurut standar hidup antar waktu dan antar daerah. Ekonom-ekonom Bank Dunia Martin Ravallion, Gaurav Datt, dan Dominick van de Walle memperlihatkan bahwa *garis kemiskinan nasional* ikut meningkat dengan meningkatnya rata-rata konsumsi sebuah negara. Banyak orang Amerika yang saat ini dikategorikan miskin oleh standar Amerika saat ini, sebenarnya mempunyai jumlah materi lebih banyak dibanding orang-orang Amerika non-miskin pada tahun 1950-an; juga jika dibandingkan dengan orang-orang Afrika non-miskin hari ini (standar Afrika).

Dasgupta, (1993) melihat fakta bahwa persepsi kemiskinan bisa berubah sepanjang waktu dan bervariasi antar tempat, Ravallion, Datt, dan de Walle menyusun garis kemiskinan ekstrim (garis kemiskinan bawah) dan garis kemiskinan atas, yang akan bisa digunakan untuk membandingkan tingkat kemiskinan absolut antar negara. Garis kemiskinan ekstrim, disebut juga garis kemiskinan minimum absolut, didasarkan pada standar di India, sebuah negara dengan jumlah penduduk sangat besar (955 juta jiwa dan tingkat kemiskinan 40 persen, pada tahun 1996). Definisi yang digunakan oleh Bank Dunia tersebut didasarkan pada hasil penelitian para ekonom pendahulunya yaitu Montek S. Ahluwalia, Nicholas G. Carter, dan Hollis B. Chenery. Para ekonom ini mendefinisikan garis kemiskinan sebagai pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dasar, yaitu suplai harian atas 2.250 kalori per kepala, setara dengan \$275 per kapita pada tahun 1985.

Garis kemiskinan atas Bank Dunia adalah \$370 per kapita pada tahun 1985. Untuk bisa lepas dari garis kemiskinan atas ini, seseorang harus bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar yang telah disebutkan di atas, ditambah beberapa

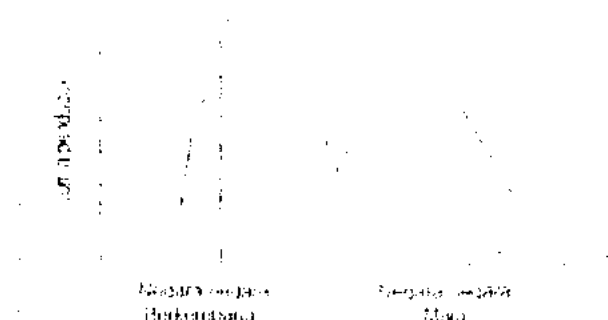
kebutuhan tambahan yang berbeda antara negara, biasanya bersifat kebutuhan sosial. Dengan demikian garis kemiskinan atas ini lebih subyektif.

Dengan informasi distribusi pendapatan tertentu, tingkat kemiskinan suatu negara ditentukan dengan menghitung persentase populasi berpendapatan kurang dari \$370, dan kemiskinan ekstrim dengan menghitung persentase populasi berpendapatan kurang dari \$275. Dengan perhitungan ini:

- 31 persen (atau 1,073 milyar) penduduk di negara-negara berkembang, dan 22 persen dari total penduduk dunia, adalah miskin pada tahun 1985
- 31 persen (atau 1,116 milyar) penduduk di negara-negara berkembang, dan 22 persen penduduk dunia adalah miskin pada tahun 1990
- 30 persen (atau 1,438 milyar) penduduk negara-negara berkembang, dan 25 persen dari dunia, adalah miskin pada tahun 1996
- 24 persen (atau 1,210 milyar) penduduk negara-negara berkembang, dan 20 persen dari penduduk dunia diproyeksikan miskin pada tahun 2000
- Pada tahun 1985, 18 persen (atau 633 juta jiwa) penduduk di negara-negara maju, (atau 13 persen dari dunia).

Gambar 4.1.

#### Distribusi Pendapatan di Negara Kaya & Miskin



Nafziger, (1997) Ravallion, Datt, dan van de Waile menyatakan bahwa dengan standar kemiskinan atas sebesar \$370, kemiskinan di negara-negara maju berjumlah sangat kecil dan bisa diabaikan. Gambar menunjukkan bahwa ekor kiri kurva negara-negara maju (kurva sebelah kanan) melebihi garis kemiskinan ( $P$ ), sehingga boleh dikatakan bahwa jumlah kemiskinan di negara maju tidak signifikan, atau boleh dikatakan tidak ada. Sementara itu kurva sebelah kiri menggambarkan situasi negara-negara berkembang; 30 persen penduduk berada dalam kemiskinan, yaitu terletak di sebelah kiri garis  $P$ .

#### 4.1.3. Kurva Lorenz dan Indeks Gini: Distribusi Pendapatan

Diskusi kali ini tidak hanya menganalisis distribusi pendapatan kaum miskin, tetapi mengukur distribusi pendapatan keseluruhan penduduk, miskin dan tidak miskin, dengan alat bantu **kurva Lorenz dan indeks Gini**.

Yang perlu dicatat adalah bahwa indeks-indeks distribusi pendapatan biasanya mengukur kemiskinan relatif, bukan absolut. Telah kita singgung bahwa kemiskinan relatif adalah ukuran kemiskinan yang membandingkan pendapatan satu kelompok masyarakat dengan pendapatan kelompok masyarakat lainnya. Untuk melihat ketimpangan pendapatan, perhatikan kurva Lorenz pada Gambar. Jika distribusi pendapatan merata sempurna, kurva Lorenz akan berupa garis  $45^0$ . Jika distribusi pendapatan tidak merata sempurna, yaitu hanya satu orang yang menerima pendapatan, kurva Lorenz akan mengikuti sumbu  $x$  bawah dan sumbu  $y$  kanan. Inilah yang disebut kurva tidak merata sempurna. Dalam kenyataan, kurva Lorenz terletak di antara garis  $45^0$  dan garis tidak merata sempurna. Tabel 4. 1. memperlihatkan distribusi pendapatan personal dua negara. Brazil adalah negara yang mempunyai ketimpangan pendapatan terbesar kedua di dunia setelah Botswana. (Ketimpangan



distribusi pendapatan Afrika Selatan mungkin sama tingginya dengan Brazil, hanya sayangnya tidak terdapat data tentang distribusi pendapatan perorangannya; kita hanya punya catatan bahwa 5 persen penduduk terkaya, kebanyakan kulit putih, memiliki 88 persen dari aset total). Bangladesh adalah negara dengan ketimpangan pendapatan terendah (Abdul Hakim, 2002, 213-214).

Data dalam Tabel diatur dalam urutan menaik dari populasi kuintil 1 (20 persen atau seperlima pemilik pendapatan terendah) sampai dengan kuintil kelima (20 persen pemilik pendapatan tertinggi).

Tabel 4. I.

## Distribusi Pendapatan Bangladesh, Brazil, dan Dunia

Kuintil	Bangladesh (1988-89)	Brazil (1991)	Dunia (1989)
Populasi	Persen	Persen	Persen
1	9,5	2,1	1,4
2	13,4	4,9	1,8
3	17,0	8,9	2,3
4	21,6	16,8	11,8
5	38,5	87,3	62,7
Total	100,0	100,0	100,0
Koefisien Gini	0,26	0,57	0,87

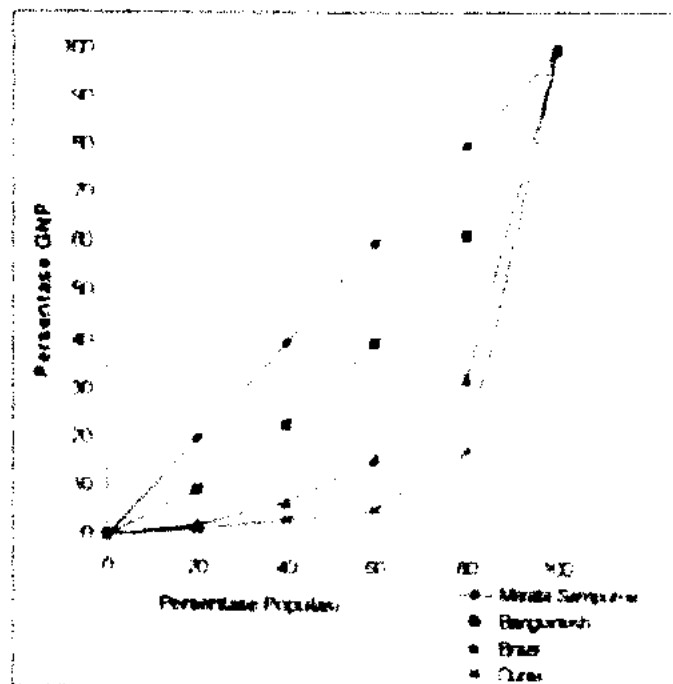
Sumber: *World Bank, World Development Report, 1993, dalam Nafziger, 1997, hal 133*

Kita juga bisa menganalisis situasi distribusi pendapatan dunia. Ketimpangan pendapatan dunia melebihi ketimpangan dalam sebuah negara individual. Sebesar 20

persen teratas dari pemilik pendapatan dunia menerima 83 persen pendapatan global, dan 40 persen penduduk dunia termiskin hanya menerima 3 persen. Di Brazil, 20 persen penduduk terkaya menerima 67 persen dari pendapatan, dan 40 persen termiskin menerima hanya 7 persen. Kurva Brazil berada di sebelah kiri dari kurva dunia dalam Gambar.

Gambar 4.2.

Kurva Lorenz Bangladesh (1988-1989), Brasil (1991), dan Dunia (1989)



Jika  $x$  dan  $y$  adalah koordinat dari kurva Lorenz (dengan dasar nilai-nilai kumulatif), dan  $\downarrow x$  dan  $\downarrow y$  adalah tambahan yang melewati koordinat-koordinat tersebut, maka Indeks Gini untuk ketimpangan bisa dihitung sebagai berikut:

$$G = \frac{2}{10.000} \sum (x \cdot y) \Delta x$$

Penjumlahan dilakukan sebanyak jumlah tambahan  $y$  di antara batas-batas tersebut. Selain dengan rumus tersebut, Indeks Gini bisa juga dicari dengan membagi *luas daerah antara kurva merata sempurna dan kurva Lorenz dengan seluruh luas daerah di bawah kurva merata sempurna*. Nilainya berada dalam rentang antara 0 sampai 1; di mana 0 menyatakan distribusi merata sempurna sedangkan 1 menyatakan distribusi tidak merata sempurna. Indeks Gini tahun 1989 untuk dunia adalah 0,87 (sangat tidak merata); yang meningkat dari 0,69 pada tahun 1960, menjadi 0,71 pada tahun 1970, dan menjadi 0,79 pada tahun 1980. Distribusi pendapatan global lebih tidak merata dari pada distribusi sebuah negara individual karena kesenjangan antar negara dalam GNP per kapita ditambahkan pada kesenjangan antar negara (Abdul Hakim, 2002, 214-215).

#### 4.1.4. Tahap Awal dan Akhir dari Pembangunan

Ekonom pemenang Nobel Simon Kuznets menghipotesiskan bahwa sepanjang industrialisasi, *ketimpangan distribusi pendapatan mengikuti pola kurva U-terbalik*; pertama meningkat dan kemudian menurun, seiring proses pertumbuhan ekonomi (Simon Kuznets, dalam Pressman, 1999, 176). Hal ini berarti bahwa pada pertumbuhan ekonomi tahap awal, kaum miskin hanya mendapatkan bagian pendapatan yang rendah sedangkan penduduk kaya menerima bagian pendapatan yang lebih besar. Irma Adelman, Cynthia, dan Taft Morris (1994) membantu menjelaskan hipotesis tersebut dengan menyatakan bahwa perekonomian di negara-negara berkembang bersifat dual di mana pendapatan dan produktivitas sektor moderen jauh lebih besar dari pada sektor tradisional. Perekonomian dual adalah perekonomian yang terdiri dari dua sektor yang sangat berbeda, tetapi tumbuh bersama, biasanya antara sektor modern dan sektor tradisional. Ketika sebuah perekonomian agraris yang

subsistem mulai tumbuh, ditandai dengan perpindahan dari sektor tradisional ke sektor moderen (melalui perluasan sektor moderen, terutama manufakturing, pertambangan, dan prosesing), ketimpangan pendapatan biasanya meningkat. Data mengindikasikan bahwa pangsa pendapatan **60 persen kaum miskin dan 20 persen kaum menengah** menurun secara signifikan sementara pangsa pendapatan **5 persen kaum kaya** meningkat. Penurunan pendapatan kaum miskin dan kaum menengah tersebut terjadi ketika petani berubah menjadi pekerja yang tidak mempunyai tanah sepanjang konsolidasi tanah Eropa pada abad ke-16 sampai 19, dan ketika bibit-bibit varitas unggul digunakan pertam kali pada pertanian komersial di India dan Pakistan.

Jika tahap pertama terlampaui, pembangunan tahap berikutnya tidak banyak berpengaruh pada pendapatan 5 persen kaum kaya, terutama jika pemerintah mulai campur tangan dengan kebijakannya yang memihak kaum nonkaya. Yang banyak diuntungkan dan pembangunan tahap kedua ini adalah kelompok-kelompok berpendapatan menengah. Pada tahap-tahap akhir, pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan bagian pendapatan kaum miskin (Simon Kuznets, dalam Pressman, 1999, 176).

Apakah data *time series* mendukung hipotesis kurva U-terbalik? Data time series per negara jarang didapat, dan walaupun ada kurang bisa dipercaya. Sedikit data time series yang tersedia mengindikasikan bahwa; pertama, hipotesis kurva U-terbalik berlaku bagi negara-negara maju. Konsentrasi pendapatan di Inggris, Jerman, Belgia, Nederland dan Denmark meningkat dari masa pre-industri sampai awal industrialisasi dan menurun dari awal sampai akhir industrialisasi. Pada akhir abad ke-19 di Eropa ketimpangannya sangat tinggi, dan yang tertinggi adalah di Inggris, dimana 10 persen terkaya menerima 50 persen pendapatan dan 20 persen termiskin menerima 4 persen

pendapatan. Distribusi ini mirip dengan Brazil dan Panama hari ini, di mana 10 persen terkaya menerima 40 sampai 50 persen pendapatan dan 20 persen yang termiskin menerima 2 persen pendapatan. *Kedua*, data paling *reliable* di negara-negara berkembang mengindikasikan bahwa sejak tahun-tahun 1970-an ketimpangan meningkat di negara-negara berpendapatan rendah dan rendah-menengah di Bangladesh, Filipina, Kolombia, dan Thailand dan jatuh di negara-negara berpendapatan menengah seperti Taiwan, *mendukung hipotesis kurva U-terbalik*; akan tetapi menurun di negara-negara berpendapatan rendah dan rendah menengah seperti Pakistan, Costa Rica, dan Peru, dan meningkat di negara-negara berpendapatan menengah seperti Argentina, Brazil, dan Meksiko, *tidak sesuai dengan hipotesis kurva U-terbalik* (Jeffrey G. Williamson, dalam Nafziger, 1977, 137). Kesimpulannya, pertumbuhan industrialisasi di Eropa mengikuti kurva U-terbalik, sementara data negara-negara berkembang terlalu beragam dan meragukan untuk memperkuat kurva U-terbalik tersebut.

#### **4.1.4.1. Kemiskinan Absolut di Negara-negara Berkembang**

Kurva Lorenz dan indeks Gini memang bisa memberikan informasi tentang ketimpangan distribusi pendapatan, dengan demikian memberikan informasi kemiskinan relatif - di negara-negara berkembang. Tetapi dalam berbagai kasus, yang lebih diperlukan di negara berkembang adalah informasi tentang kemiskinan absolut. Banyak ekonom sekarang ini yang mengkhawatirkan kecukupan nutrisi, perumahan, kesehatan, pendidikan, sanitasi, dan sebagainya; apakah sudah memenuhi standar minimum tertentu di berbagai negara berkembang; dan hal ini memerlukan pengukuran garis kemiskinan absolut, bukan relatif.

Pada bagian awal bab ini kita telah mendefinisikan konsep garis kemiskinan absolut internasional dengan dasar pendapatan (\$370 per kapita tahun 1985) untuk menyediakan konsumsi kebutuhan dasar melebihi sebuah kebutuhan fisik minimum. Menurut standar ini 30 persen negara-negara berkembang (Amerika Latin, Afrika, Asia non Jepang, dan sebagian Eropa Timur).

Dengan identifikasi negara-negara yang mempunyai jumlah penduduk miskin yang besar serta kelompok-kelompok miskin dalam satu negara tertentu, kita bisa lebih cepat menentukan tipe-tipe kebijakan dan kelompok-kelompok populasi yang harus dituju untuk mengurangi kemiskinan internasional (Abdul Hakim, 2002, 216-217).

Kebanyakan kaum miskin berasal dari negara-negara dengan tingkat pendapatan per kapita yang rendah. Orang miskin sebagian besar berasal dari negara dengan distribusi pendapatan yang merata. Di India, Cina, dan Bangladesh, semua dengan ketimpangan pendapatan yang rendah, penduduk miskin terhitung 41 persen dari populasi dunia (atau 48 persen dari populasi negara-negara berkembang). India dan Bangladesh, dengan 22 persen populasi dunia, terhitung 33 persen penduduk miskin. Meskipun demikian kemiskinan absolut juga terdapat di negara-negara berpendapatan menengah atas.

Meskipun sebuah negara mempunyai pendapatan per kapita yang tinggi, tetapi jika ketimpangan pendapatannya juga tinggi, ada kemungkinan negara tersebut juga akan menghadapi masalah kemiskinan; sama peliknya dengan masalah kemiskinan di negara berpendapatan per kapita rendah. Sebagai contoh, 9 sampai 10 persen penduduk baik di Cina maupun di Cili dianggap miskin, sekalipun GNP per kapita di Cili tujuh kali dari Cina, India, Nigeria, dan Kolombia mempunyai tingkat kemiskinan

sekitar 40-42 persen, meskipun GNP per kapita Kolombia tahun 1992 adalah empat kali dari India maupun Nigeria.

Kebutuhan dasar dapat dibagi dalam 2 golongan yaitu kebutuhan dasar yang diperlukan sekali untuk mempertahankan hidupnya dan kebutuhan lain yang lebih tinggi. *United Nation Research Institute for Social Development (UNRISD)* menggolongkan kebutuhan dasar manusia atas 3 kelompok yaitu: pertama, kebutuhan fisik primer yang terdiri dari kebutuhan gizi, perumahan dan kesehatan; kedua, kebutuhan kultural yang terdiri dari pendidikan, waktu luang (*leisure*), dan rekreasi serta ketenangan hidup; dan ketiga, kelebihan pendapatan untuk mencapai kebutuhan lain yang lebih tinggi.

Kebutuhan dasar tidak hanya meliputi kebutuhan orang atau keluarga, tetapi juga meliputi kebutuhan fasilitas lingkungan kehidupan manusia, seperti yang dikemukakan oleh *International Labor Organization (ILO, 1976)* sebagai berikut:

”Kebutuhan dasar meliputi 2 unsur: pertama, kebutuhan yang meliputi tuntutan minimum tertentu dari suatu keluarga sebagai konsumsi pribadi seperti makanan yang cukup, tempat tinggal, pakaian, juga peralatan, dan perlengkapan rumah tangga yang dilaksanakan. Kedua, kebutuhan meliputi pelayanan sosial yang diberikan oleh dan untuk masyarakat seperti air minum yang bersih, pendidikan, dan kultural.”

Konsep kemiskinan yang didasarkan atas perkiraan kebutuhan dasar minimum merupakan konsep yang mudah dimengerti. Tetapi penentuan garis kemiskinan secara obyektif sulit dilaksanakan karena banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Garis kemiskinan berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya, sehingga tidak ada satu garis kemiskinan yang berlaku umum.

#### 4.1.4.2 Kemiskinan Relatif

Miller, (1971) orang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum tidak selalu berarti “tidak miskin”. Ada ahli yang berpendapat bahwa walaupun pendapatan sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat di sekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya, daripada lingkungan orang yang bersangkutan.

Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah. Hal ini jelas merupakan perbaikan dari konsep kemiskinan absolut. Konsep kemiskinan relatif bersifat dinamis, sehingga kemiskinan akan selalu ada.

Oleh karena itu, Kincaid (1975) melihat kemiskinan dari aspek ketimpangan sosial. Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan selalu miskin. Menurut kriteria Bank Dunia: pertama, jika 40 persen jumlah penduduk dengan pendapatan terendah menerima kurang dari 12 persen dari pendapatan nasional, maka disebut pembagian pendapatan sangat timpang; kedua, jika 40 persen jumlah penduduk dengan pendapatan terendah menerima antara 12 - 17 persen dari pendapatan nasional, maka disebut ketidakmerataan sedang; dan ketiga, jika 40 persen jumlah penduduk dengan pendapatan terendah tersebut menerima lebih dari 17 persen dari pendapatan nasional, maka disebut ketidakmerataan rendah.



## 4.2. Indikator Kemiskinan

Indikator kemiskinan ada bermacam-macam yakni: konsumsi beras per kapita per tahun, tingkat pendapatan, tingkat kecukupan gizi, KFM, dan tingkat kesejahteraan.

### 4.2.1. Tingkat Konsumsi Beras

Sajogyo, (1977) menggunakan tingkat konsumsi beras per kapita sebagai indikator kemiskinan. Untuk daerah pedesaan, penduduk dengan konsumsi beras kurang dari 240 kg per kapita per tahun bisa digolongkan miskin. Sedangkan untuk daerah perkotaan adalah 360 kg per kapita per tahun.

Secara lebih terinci, Sajogyo membagi lagi indikator kemiskinan tersebut menjadi 3 kelompok:

Tabel 4.2.

#### Indikator Kemiskinan

	Pedesaan	Perkotaan
a. Melarat	180 kg	270 kg
b. Sangat Miskin	240 kg	360 kg
c. Miskin	320 kg	480 kg

Sumber : Badan Pusat Statistik

Namun sejak tahun 1979, garis *Melarat* dihilangkan dan kemudian ditambah dengan garis *Nyaris Miskin*, yaitu dengan 480 kg di desa dan 720 kg di perkotaan.

### 4.2.2. Tingkat Pendapatan

Menurut BPS, (1989) di daerah perkotaan pendapatan yang dibutuhkan untuk melepaskan diri dari kategori miskin adalah Rp.4.522,00 per kapita pada tahun 1976, sedang pada tahun 1987 adalah Rp.17.381,00.

Di daerah pedesaan pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan yakni sekitar Rp.2.849,00 pada tahun 1976 dan Rp.10.294,00 pada tahun 1987.

Hal ini dapat dipahami karena dinamika kehidupan yang berbeda antara keduanya. Penduduk di daerah perkotaan mempunyai kebutuhan yang relatif sangat beragam dibandingkan dengan daerah pedesaan sehingga mempengaruhi pula pola pengeluaran. Batas garis kemiskinan antara daerah perkotaan dan pedesaan pada kurun waktu 1976 - 1990 dapat dilihat pada tabel 4.3. di bawah ini:

Tabel 4.3.

## Batas Garis Kemiskinan, 1976 - 1990 (Rp/kapita/bulan)

Tahun	Perkotaan	Pedesaan
1976	4.522	2.849
1978	4.969	2.981
1980	6.831	4.449
1981	9.777	5.877
1984	13.731	7.746
1987	17.381	10.294
1990	20.614	13.295

Sumber: BPS, 1991.

#### 4.2.3. Indikator Kesejahteraan Rakyat

Selain data pendapatan dan pengeluaran, ada berbagai komponen tingkat kesejahteraan yang lain yang sering digunakan. Pada publikasi UN (1961) yang berjudul *International Definition and Measurement of Levels of Living: An Interim Guide* disarankan 9 komponen kesejahteraan yaitu kesehatan, konsumsi makanan dan

gizi, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, jaminan sosial, sandang, rekreasi dan kebebasan.

### **4.3. Strategi atau Kebijakan Dalam Mengurangi Kemiskinan**

#### **4.3.1. Pembangunan Pertanian**

Huppi dan Ravallion, (1989) sektor pertanian berperan penting dalam pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di Indonesia. Ada 3 aspek dari pembangunan pertanian yang telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pengurangan kemiskinan tersebut, terutama di daerah pedesaan. Kontribusi terbesar bagi peningkatan pendapatan pedesaan dan pengurangan kemiskinan pedesaan dihasilkan dari adanya revolusi teknologi dalam pertanian padi, termasuk pembangunan irigasi. Profitabilitas produksi padi telah meningkat sekitar dua per tiga (dalam ukuran rill) antara 1969 dan 1987, ketika varietas unggul menggantikan varietas tradisional. Pendapatan pertanian padi tahunan diperkirakan meningkat lebih dari dua kali lipat, dari sekitar Rp.34.000,00 per Ha menjadi lebih dari Rp.82.000,00 pada tingkat harga 1969. Kontribusi utama lainnya datang dari program Pemerintah untuk menggalakkan produksi tanaman keras. Misalnya, lebih dari 200.000 petani di luar Jawa telah dibantu untuk menanam karet, kelapa dan kelapa sawit. Tergantung pada tingkat input dan manajemennya, para petani tersebut memperoleh pendapatan bersih antara Rp.750.000,00 - Rp.1.200.000,00 per Ha (pada tingkat harga 1988). Dan akhirnya, pembangunan luar Jawa juga berperan mengurangi kemiskinan di Jawa melalui pembangunan pertanian di daerah-daerah transmigrasi.

#### **4.3.2. Pembangunan Sumber Daya Manusia**

Perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan dan gizi) merupakan alat kebijakan penting dalam strategi pemerintah secara

keseluruhan untuk mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan penduduk Indonesia. Perluasan ruang lingkup dan kualitas dari pelayanan-pelayanan pokok tersebut membutuhkan investasi modal insani yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas golongan miskin tersebut. Pada waktu yang sama, pelayanan-pelayanan tersebut secara langsung memuaskan konsumsi pokok yang dibutuhkan yang merupakan suatu sasaran kebijakan penting pula.

Di Indonesia, atau di mana saja, pendidikan (formal dan non-formal) bisa berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang, baik secara tidak langsung melalui perbaikan produktivitas dan efisiensi secara umum, maupun secara langsung melalui pelatihan golongan miskin dengan ketrampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas mereka dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan mereka.

Intervensi untuk memperbaiki kesehatan dari pemerintah juga merupakan suatu alat kebijakan penting untuk mengurangi kemiskinan. Ada tiga faktor utama mendasari kebijakan ini. Pertama, berkurangnya beban penderitaan secara langsung memuaskan kebutuhan konsumsi pokok yang juga merupakan tujuan kebijaksanaan sosial yang sangat penting. Kedua, perbaikan kesehatan akan meningkatkan produktivitas golongan miskin: kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan daya kerja, mengurangi hari tidak bekerja dan menaikkan output energi. Dan ketiga, penurunan tingkat kematian bayi dan anak-anak secara tidak langsung juga berperan dalam mengurangi kemiskinan yakni menurunkan tingkat kesuburan: tingkat kematian yang semakin rendah tidak saja membantu para orang tua untuk mencapai jumlah keluarga yang mereka inginkan, tetapi juga membuat mereka menginginkan keluarga yang lebih kecil.

Pelayanan-pelayanan pokok seperti air bersih, tempat pembuangan sampah, perumahan dan lain-lainnya juga penting bagi golongan miskin. Tanpa kemajuan dalam perbaikan akses golongan miskin terhadap pelayanan-pelayanan pokok tersebut, efektivitas dari setiap pelayanan sosial, seperti pendidikan dan kesehatan di atas, bisa terganggu. Walaupun tujuan pokoknya sama, strategi dan prioritas pemerintah yang diperlukan berbeda antara daerah pedesaan dan perkotaan, karena perbedaan kebutuhan dan kerangka kelembagaan. Di daerah pedesaan, kebutuhan yang kritical adalah air bersih dan sanitasi. Pelayanan-pelayanan lainnya kurang begitu kritical, karena kondisi hidup dan perumahan secara umum lebih baik. Daerah perkotaan memerlukan program pengadaan pelayanan pokok yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan golongan miskinnya. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan-kebijakan pembangunan perkotaan yang dapat mengakomodasi penduduk perkotaan yang sedang meningkat terutama kelompok pendapatan rendah, seperti penyediaan air bersih, pengelolaan pembuangan sampah manusia, program perbaikan kampung, penyediaan perumahan murah bagi kelompok miskin.

#### **4.3.3. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)**

LSM-LSM bisa memainkan peran yang lebih besar di dalam perancangan dan implementasi program pengurangan kemiskinan. Karena fleksibilitas dan pengetahuan mereka tentang komunitas yang mereka bina, LSM-LSM ini untuk beberapa hal bisa menjangkau golongan miskin tersebut secara lebih efektif ketimbang program-program pemerintah. Lebih dari itu, keterlibatan aktif dari LSM-LSM tersebut di dalam program-program pemerintah cenderung untuk meningkatkan “penerimaan” masyarakat pedesaan terhadap program-program pemerintah dan oleh karena itu pada akhirnya akan meningkatkan partisipasi masyarakat. Keterlibatan

LSM-LSM juga dapat meringankan biaya finansial dan staf dalam pengimplementasian program padat-karya untuk mengurangi kemiskinan.

Bentuk dan macam organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti bisa dikelompokkan ke dalam 4 kategori:

- (1) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- (2) Lembaga Pembina Swadaya Masyarakat (LPSM)
- (3) Organisasi-organisasi sosial lainnya, dan
- (4) Organisasi-organisasi Semi-Pemerintah

#### **4.4. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis penelitian adalah suatu kesimpulan awal yang masih bersifat sementara. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyerapan tenaga kerja, inflasi, laju pertumbuhan ekonomi, secara simultan berpengaruh terhadap terjadinya jumlah penduduk miskin. Secara parsial pengaruh variabel-variabel tersebut dihipotesiskan sebagai berikut:

1. Penyerapan Tenaga Kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin.
2. Inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin.
3. Laju Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin.
4. Penyerapan Tenaga Kerja, Inflasi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin.

## **BAB V**

### **METODE PENELITIAN**

#### **5.1. Metode penelitian**

##### **5.1.1. Daerah Penelitian**

Daerah penelitian dilaksanakan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

##### **5.1.2. Jenis Dan Sumber Data**

Studi Kasus, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dan dibuat oleh pihak lain yang didasarkan pada urutan waktu tertentu (*Time Series*). Data sekunder ini diperoleh dari kantor BPS DIY, dan sumber-sumber lain yang masih berkait.

#### **5.2. Definisi Operasional**

Masalah kemiskinan ini masih tetap relevan dan penting untuk dikaji dan diupayakan penanggulangannya, kalau tujuan pembangunan nasional yang adil dan merata serta terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya ingin dicapai, dari hal-hal itu maka variabel-variabel yang diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Jumlah penduduk miskin merupakan masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan yang diambil dari atau menurut pengertian dan BPS.
2. Inflasi merupakan kenaikan harga-harga secara umum yang terjadi pada harga harga barang di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Laju Pertumbuhan Ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

4. Tingkat Penyerapan Tenaga kerja merupakan jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian yang terserap pada suatu waktu tertentu.

### 5.3. Metode Analisis Data

Sesuai dengan hipotesis yang telah ditentukan dalam penelitian ini, maka alat analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### 5.3.1. Analisis Deskriptif

Yaitu metode analisis dengan pendeskripsian variabel-variabel yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti sebagai pendukung hasil dari analisis kuantitatif.

#### 5.3.2. Analisis Kuantitatif

Yaitu metode analisis data yang menganalisis data dan hal-hal yang berhubungan dengan angka dan menggunakan rumus-rumus dan teknik-teknik perhitungan yang digunakan untuk menganalisis masalah yang sedang diteliti. Dalam analisis kuantitatif ini menggunakan analisis analisis regresi linier berganda.

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, dimana dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 variabel. Hubungan antara variabel-variabel tersebut berbentuk linear atau secara inherent linear. Bentuk yang tidak linear tetapi dapat ditransformasikan atau diubah menjadi hubungan yang bersifat linear (Soelistyo, Pengantar Ekonometrika I, BPFE, Yogyakarta, 1982, Hal 235 - 236).

Bentuk umum model yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = f(X_1 X_2 X_3)$$



Keterangan:

- Y : Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)  
 X<sub>1</sub> : Tingkat Penggunaan Tenaga Kerja (jiwa)  
 X<sub>2</sub> : Inflasi (Persen)  
 X<sub>3</sub> : Laju Pertumbuhan Ekonomi (Persen)

Bentuk hubungan atau fungsi di atas adalah bentuk yang tidak linear, walaupun tidak linear tetapi apabila secara inherent linear maka model itu diubah atau ditransformasikan pada model regresi berganda dan agar tercapai maksud dan tujuan dari penelitian dan pengujian hipotesis, maka dipergunakan metode Ekonometri.

Secara umum, bentuk persamaan yang dipergunakan adalah persamaan bentuk linear:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

- Y : Jumlah Penduduk Miskin  
 a : konstanta  
 b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>, b<sub>3</sub> : koefisien regresi  
 e : variabel pengganggu  
 X<sub>1</sub> : Tingkat Penggunaan Tenaga Kerja  
 X<sub>2</sub> : Inflasi  
 X<sub>3</sub> : Laju Pertumbuhan Ekonomi

Dari analisis regresi linear berganda akan diperoleh koefisien regresi linear dari masing-masing variabel. Untuk menguji setiap koefisien regresi, digunakan bantuan analisis Eviews. Pengujian koefisien regresi dilakukan baik secara individual (t-test) dan secara serentak (F-test).

#### **5.4. Pengujian Hipotesis**

Untuk menguji bisa atau tidaknya model regresi tersebut digunakan, serta untuk menguji kebenaran dari hipotesis yang ada, maka perlu diadakan pengujian statistik sebagai berikut:

##### **5.4.1. Uji t-Statistik (Metode Pengujian Parsial)**

Dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara individual terhadap variabel tidak bebas. Dengan menganggap variabel bebas (independen) lainnya konstan. Kesimpulan hasil uji t dilakukan dengan melihat hasil output regresi dengan bantuan program Eviews dimana jika probabilitas masing-masing variabel kurang dari 5% (0,05) berarti signifikan atau secara terpisah variabel-variabel tersebut dapat mempengaruhi variabel dependen. Begitu pula sebaliknya jika probabilitasnya lebih dari 5% (0,05) berarti tidak signifikan.

##### **5.4.2. Uji F Statistik (Metode Pengujian Simultan)**

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara keseluruhan signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel dependen apabila nilai probabilitas (F-Statistik) < dari alpha 0,05, maka variabel-variabel independen secara keseluruhan atau secara bersama-sama variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen.

##### **5.4.3. Koefisien Determinasi $R^2$**

Nilai  $R^2$  menunjukkan besarnya variasi variabel-variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Nilai  $R^2$  berkisar antara 0 dan 1. Semakin besar nilai  $R^2$  berarti semakin besar variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independen. Sebaliknya, semakin kecil nilai  $R^2$  berarti semakin kecil variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel-

variabel independen. Jadi informasi yang dapat diperoleh dari koefisien determinasi  $R^2$  adalah untuk mengetahui seberapa besar variasi variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen.

Sifat dari koefisien determinasi ini adalah:

- $R^2$  merupakan besarnya non negatif
- Batasnya adalah  $0 < R^2 < 1$

Apabila  $R^2$  bernilai 0 berarti tidak ada hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel yang dijelaskan. Semakin besar nilai  $R^2$  menggambarkan semakin tepat garis regresi dalam menggambarkan nilai-nilai observasi. Tingkat  $R^2$  tinggi jika nilainya antara 0,4 sampai 0,6 untuk penelitian dibidang ilmu sosial.

### **5.5. Uji Asumsi Klasik**

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk melihat apakah model yang diteliti mengalami penyimpangan klasik atau tidak, sehingga pemeriksaan penyimpangan terhadap asumsi klasik ini perlu dilakukan. Asumsi klasik yang dipakai untuk membentuk model adalah uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

#### **5.5.1. Pengujian Multikolinearitas**

Adalah suatu keadaan dimana satu atau lebih variabel independen dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari variabel independen lainnya untuk meregresi tiap variabel independen terhadap variabel independen lainnya. Multikolinieritas ini koefisien regresinya tak tertentu dan kesalahan standarnya tak terhingga. Jika kolinieritas tingkat tinggi tetapi tidak sempurna, penafsiran koefisien regresi adalah mungkin tetapi kesalahan standarnya cenderung untuk besar, sehingga hasilnya nilai populasi dari koefisien tidak dapat ditaksir dengan tepat.

Konsekuensi yang ditimbulkan dari penyimpangan asumsi klasik yaitu multikolinieritas ini adalah koefisien tidak tentu dan kesalahan standarnya tidak terhingga. Jika kolinier tingkat tinggi tetapi tidak sempurna, penafsiran koefisien regresi adalah mungkin, tetapi kesalahan standarnya cenderung untuk besar, sebagai hasilnya nilai populasi dari koefisien tidak dapat ditaksir dengan tepat. Cara melakukan deteksi terhadap multikolinieritas pada penelitian ini dilakukan dengan uji korelasi, dimana apabila dalam hasil uji korelasi hasilnya  $> 0,8$  maka terdapat multikolinieritas.

#### **5.5.2. Pengujian Heteroskedastisitas**

Suatu asumsi kritis dari model regresi linier klasik adalah bahwa gangguan semuanya mempunyai varian yang sama. Jika asumsi ini tidak terpenuhi akan terjadi heteroskedastisitas atau dalam kata lain salah satu penyimpangan dalam asumsi klasik, dimana kondisi tertentu tiap (*disturbance*) mengandung varian yang tidak konstan. Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji Park, dimana apabila dalam hasil uji Park tersebut probabilitasnya kurang dari 0,05 maka terdapat heteroskedastisitas dan sebaliknya jika probabilitasnya lebih dari 0,05 maka terdapat heteroskedastisitas.

#### **5.5.3. Pengujian Autokorelasi**

Suatu model regresi yang mengalami gejala autokorelasi berarti telah terjadi korelasi antara observasi-observasi pada suatu tempat dan pada suatu waktu.

Untuk mengetahui apakah suatu model regresi mengalami gejala autokorelasi atau tidak dapat dilakukan dengan menggunakan Up Serial LM test. Untuk mengatasi adanya autokorelasi perlu dilakukan perbaikan, tergantung pada sifat ketergantungan

diantara gangguan ( $\epsilon_t$ ), tetapi karena gangguan tidak bisa diamati, praktek yang biasa dilakukan adalah dengan mengasumsikan bahwa gangguan tadi ditimbulkan oleh mekanisme yang masuk akal.

Dalam penelitian ini pengujian autokorelasi dengan menggunakan uji Serial LM test, dimana jika hasil ujinya probabilitasnya kurang dari 0,05 maka terdapat autokorelasi dan sebaliknya jika dalam hasil uji probabilitasnya lebih dari 0,05 maka tidak terdapat autokorelasi.

## **BAB VI**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **6.1. Analisis Deskripsi Data**

Analisis ini merupakan suatu metode dengan cara mendeskripsikan faktor-faktor yang berhubungan dengan permasalahan yang dimaksud yaitu untuk pendeskripsian masalah kemiskinan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hal ini sebagai pendukung kuantitatif. Penelitian ini berkaitan dengan tingkat kemiskinan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipengaruhi oleh faktor tenaga kerja, inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi. Data tersebut seperti dibawah ini :

##### **1. Tenaga Kerja**

Tenaga Kerja di Prop DIY sangat majemuk karena selain dari penduduk DIY sendiri ada juga penduduk luar yang bekerja didaerah ini, dan jumlahnya pun dari tahun ketahun semakin meningkat, angkanya cukup signifikan, hat ini disebabkan oleh banyaknya penduduk migrasi dari luar daerah ini seperti mahasiswa pendatang yang tidak kembali ke daerahnya ataupun penduduk biasa yang sengaja mencari pekerjaan di daerah ini, hat ini karena daerah ini] merupakan wilayah yang kondusif untuk berinvestasi bagi para investor dan ini menarik para pekerja untuk datang kewilayah ini.

Tabel 6.1.

Jumlah Penduduk Miskin, Tenaga Kerja, Inflasi, Laju Pertumbuhan Ekonomi DI  
Propinsi DIY.

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Tenaga Kerja (Jiwa)	Inflasi(%)	Laju Pertumbuhan Ekonomi(%)
1987	1093700	1539582	10.37	4.08
1988	1131775	1557231	4.43	6.00
1989	1197850	1587267	5.21	6.27
1990	1207925	1535884	10.73	4.57
1991	1246000	1571361	8.38	5.19
1992	1284075	1594028	4.78	6.94
1993	1322150	1546471	10.01	6.40
1994	1360225	1589905	8.55	8.11
1995	1398300	1491917	9.64	8.09
1996	1436375	1513978	3.05	7.80
1997	1474450	1556268	12.72	3.51
1998	1512525	1579660	76.43	11.18
1999	789100	1624079	2.51	0.99
2000	1035800	1724775	7.32	5.03
2001	767600	1699175	12.56	3.37
2002	635600	1734114	12.01	4.02
2003	6368000	1764007	5.13	4.09

Sumber : Badan Pusat Statistik Prop MY

## 2. Perkembangan jumlah penduduk miskin

Dari tahun ke tahun jumlah penduduk miskin semakin berkurang, ini khususnya berkat keberhasilan pembangunan, khususnya dari tahun 1987 sampai 2003, tapi

setelah itu terjadinya krisis ekonomi jumlah penduduk miskin semakin banyak, khususnya pada tahun 1998 yaitu di Propinsi DIY sebesar 1512525 jiwa, tapi setelah itu kembali menurun berkat keberhasilan pemerintah daerah.

### 3. Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum, dimana untuk Prop DIY angka inflasinya turun naik tercatat pada tahun 2002 sebesar 12,01 tapi kemudian pada tahun 2003 turun sebesar 5,13 hal ini karena wilayah ini merupakan wilayah yang kondusif, sehingga angka inflasi tidak terlalu banyak mempengaruhi daerah ini.

### 4. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya terus bertambah baik sesuai dengan perkembangan perekonomian Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tercatat pada lima tahun terakhir ini di Badan Pusat Statistik Prop DIY menunjukkan angka yang terus membaik, tercatat pada tahun 2003 sebesar 4,09 yang mana pada tahun-tahun sebelumnya hanya berkisar pada angka 3,37 sampai dengan 4,09.

## 6.2. Analisis Hasil Regresi

Hasil regresi meliputi penyajian hasil regresi berhubungan antara variabel dependen (terpengaruh) dengan variabel independen (yang mempengaruhi), secara statisti langkah analisis yang dilakukan adalah meliputi variabel-variabel independen secara individu, secara serentak dan asumsi klasik.



Tabel 6.2.

Hasil Regresi Jumlah Penduduk Miskin  
Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dependent Variable: JPM  
Method: Least Squares  
Date: 09/06/05 Time: 01:07  
Sample: 1987 2003  
Included observations: 17

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4484288.	790684.5	5.671399	0.0001
TK	-2.260710	0.464106	-4.871105	0.0003
INFLASI	991.1783	2466.916	0.401788	0.6944
LPE	48186.63	19207.98	2.508678	0.0262
R-squared	0.821847	Mean dependent var	1148838.	
Adjusted R-squared	0.780734	S. D. dependent var	285920.0	
S. E. of regression	133884.4	Akaike info criterion	26.64966	
Sum squared resid	2.33E+11	Schwarz criterion	26.84572	
Log likelihood	-222.5222	F-statistic	19.99027	
Durbin-Watson stat	1.953595	Prob(F-statistic)	0.000038	

Sumber : Data diolah

$R^2$  = 0.821847  
Adjusted R-Squared = 0.780734  
Durbin-Watson Statistik = 1.953595  
F-Statistik = 19.99027

Hasil regresi yang disajikan pada tabel 6.2. menunjukkan bahwa persamaan regresi berganda untuk faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Prop DIY adalah:

### 6.3. Uji Regresi R Squared (UJI R)

R Squared sebesar 0.821847 independen yang berupa tenaga kerja, inflasi dan laju pertumbuhan mampu menjelaskan hubungan dengan variabel : jumlah Penduduk Miskin menunjukkan bahwa, variabel ekonomi (variabel devenden), sebesar 82.19%, sedangkan sisanya sebesar 17.8153% dijelaskan oleh variabel-variabel lain selain ketiga variabel independen tersebut (dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak tennasuk dalam model).

### 6.4. Uji Regresi dengan Menggunakan Probabilitas

Dan hasil regresi diatas menunjukkan bahwa nilai probabilitas tenaga kerja dan laju pertumbuhan ekonomi signifikan pada tingkat alpha 5<sup>o</sup>% karena < dari 0,05, tetapi untuk intlasi tidak signitikan karena alphanya > 0,05 jadi ketiga variabel tersebut hanya 2 variabel yang signitikan yaitu Tenaga Kerja dan Laju Pertumbuhan Ekonomi sedangkan yang tidak signifikan adalah Inflasi, sedangkan Jumlah Penduduk Miskin mempunyai hubungan yang positif terlihat pada koefisien hasil regresinya.

### 6.5. Uji Regresi Secara Keseluruhan dengan Probabilitas (F-statistik)

F-Statistik menggambarkan hasil analisis regresi variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen (yang mempengaruhi). Dari hasil analisis menunjukkan bahwa F-hitung (F-Statistik) sebesar 19.99027 dan dengan Probabilitas 0.000038, dengan alpha 5<sup>o</sup>10 (0,05), terlihat probabilitasnya lebih kecil dari alpha yaitu  $0.000038 < 0,05$ , dengan demikian variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau Jumlah Penduduk Miskin.

### 6.6. Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui (mendeteksi) ada atau tidaknya multikolinieritas, heterokedastisitas, autokorelasi pada hasil regresi yang akan

dianalisis. Karena apabila terjadi penyimpangan terhadap asumsi klasik tersebut, uji t dan uji F yang dilakukan sebelumnya menjadi tidak valid dan secara statistik kesimpulan akhir yang diperoleh hasilnya menjadi tidak baik.

### 6.6.1. Heterokedastisitas

Untuk mengetahui ada atau tidaknya heterokedastisitas digunakan uji white heterokedastisitas yang hasilnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6.6. 1.

#### Hasil Uji White Heterokedastisitas

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	0.452875	Probability	0.827677
Obs*R-squared	3.632332	Probability	0.726288

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 09/06/05 Time: 01:10

Sample: 1987 2003

Included observations: 17

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.96E+11	3.75E+12	0.078949	0.9386
TK	-308055.5	4574020.	-0.067349	0.9476
TK^2	0.079572	1.396385	0.056984	0.9557
INFLASI	2.90E+09	3.19E+09	0.909997	0.3842
INFLASI^2	-30774540	46207349	-0.666010	0.5205
LPE	-3.90E+08	1.87E+10	-0.020919	0.9837
LPE^2	-3.59E+08	1.88E+09	-0.191545	0.8519
R-squared	0.213667	Mean dependent var		1.37E+10
Adjusted R-squared	-0.258133	S. D. dependent var		2.60E+10
S.E. of regression	2.92E+10	Akaike info criterion		51.32666
Sum squared resid	8.54E+21	Schwarz criterion		51.66975
Log likelihood	-429.2766	F-statistic		0.452875
Durbin-Watson stat	2.040929	Prob(F-statistic)		0.827677

Sumber : Data diolah

Dari uji heterokedastisitas tersebut tabel 6.6.1, menunjukkan bahwa Probabilitasnya  $> 0.05$  yang berarti bahwa tingkat kemiskinan (jumlah penduduk miskin) di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak terdapat adanya heterokedastisitas.

### 6.6.2. Autokorelasi

Untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi digunakan uji serial correlation LM Test dengan menggunakan Lags 1 yang hasilnya dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 6.6.2.

#### Hasil Uji Autokorelasi Dengan Serial LM Test

##### Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.006207	Probability	0,938504
Obs*R-squared	0.008788	Probability	0.925312

##### Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 09/06/05 Time: 23:16

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9920.097	832337.6	0.011918	0.9907
INFLASI	212.8006	3726.328	0.057107	0.9554
LPE	-253.6309	20244.75	-0.012528	0.9902
TK	-0.006818	0.490626	-0.013898	0.9891
RESID(-1)	-0.036124	0.458533	-0.078782	0.9385
R-squared	0.000517	Mean dependent var	4.30E-10	
Adjusted R-squared	-0.332644	S. D. dependent var	120681.7	
S.E. of regression	139315.2	Akaike info criterion	26.76679	
Sum squared resid	2.33E+11	Schwarz criterion	27.01186	
Log likelihood	-222.5178	F-statistic	0.001552	
Durbin-Watson stat	1.933937	Prob(F-statistic)	0.999994	

Sumber : Data diolah

Dari uji Autokorelasi tersebut tabel 6.6.2, menunjukkan bahwa Probabilitasnya  $> 0.05$  yang berarti tidak terdapat penyakit Autokorelasi.

### 6.6.3. Multikolinieritas

Untuk mengetahui ada atau tidaknya Multikolinieritas digunakan corelation yang hasilnya dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 6.6.3.

Hasil uji Multikolinieritas Dengan Menggunakan Uji Karelasi

	JPM	INFLASI	LPE	TK
JPM	1.000000	0.324809	0.699357	-0.811835
INFLASI	0.324809	1.000000	0.566981	-0.059958
LPE	0.699357	0.566981	1.000000	-.411639
TK	-0.811835	-0.059958	-0.411639	1.000000

Sumber: Data diolah

Dari uji Multikolinieritas dengan menggunakan uji korelasi tersebut tabel 6.6.3, menunjukkan bahwa hasilnya  $< 0,8$  yang berarti tidak terdapat penyakit asumsi klasik.

### 6.7. Interpretasi Hasil Regresi

Hasil Persamaan Regresi Terlihat :

$$\text{JPM} = a + b_1 \cdot \text{TK} + b_2 \cdot \text{INFLASI} + b_3 \cdot \text{LPE} + e$$

$$\text{JPM} = 4484287.601 - 2.260709813 \cdot \text{TK} + 991.17828 \cdot \text{INFLASI} + 48186.62937 \cdot \text{LPE}$$

Keterangan :

JPM = Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)

a = Konstanta

$b_1, b_2, b_3$  = Koefisien Regresi

e = Vaeribel Pengganggu

- $X_1$  = Tenaga Kerja (Jiwa)  
 $X_2$  = Inflasi (persen)  
 $X_3$  = Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen)

Dari hasil persamaan regresi diatas menunjukkan bahwa nilai Y (jumlah penduduk miskin) jika tidak dipengaruhi oleh tenaga kerja, inflasi, laju pertumbuhan ekonomi atau juga bisa dikatakan nilai ketiga variabel independen (yang mempengaruhi) tersebut adalah 0, sehingga nilai jumlah penduduk miskin sebesar 4484288.

#### 1. Tenaga Kerja = -2,260710

Tanda parameter untuk tenaga kerja adalah negatif yang berarti angkanya - 2,260710 menunjukkan bahwa apabila permintaan tenaga kerja naik sebesar 1 jiwa, maka akan menyebabkan turunnya atau berkurangnya penduduk miskin di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 2,260710 jiwa (*Ceteris Paribus*). Nilai penyerapan tenaga kerja sesuai dengan hipotesis penelitian karena apabila penyerapan tenaga kerja naik maka tingkat kemiskinan turun.

#### 2. Inflasi = 991.1783

Tanda parameter untuk Inflasi adalah positif tetapi untuk variabel ini pada hasil Output E-Views menunjukkan angka yang tidak signifikan. Nilai inflasi tidak sesuai dengan hipotesis penelitian karena apabila inflasi naik maka akan mengakibatkan jumlah penduduk miskin naik. Ada beberapa faktor dan alasan yang membuat inflasi tidak signifikan yaitu antara lain:

1. Inflasi merupakan kenaikan harga-harga secara umum tetapi inflasi tidak mempengaruhi jumlah penduduk miskin karena kebutuhan pokok penduduk miskin adalah makan yaitu beras, sedangkan harga beras tetap stabil bahkan

pemerintah mensubsidi beras dengan nama RASKIN (beras untuk rakyat miskin), jadi terjadinya inflasi tidak terlalu berpengaruh terhadap penduduk miskin.

2. Inflasi dalam penelitian ini tidak signifikan karena Indonesia adalah negara yang sedang berkembang sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teori-teori pada negara yang sudah maju, jadi teori-teori inflasi dipakai pada negara yang sedang berkembang kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan teori-teori tersebut.
  3. Inflasi yang begitu tinggi yang ditandai dengan melambungnya harga-harga barang dan jasa, khususnya kenaikan BBM, dampaknya akan sangat luas sebagaimana kenaikan tarif transportasi, kenaikan BBM selalu tidak populer di mata masyarakat. Kenaikan tarif angkutan dan BBM merupakan sektor strategis serta akan berdampak pada bidang-bidang lainnya, dampak yang segera timbul adalah kenaikan harga barang yang kemudian berbuntut pada laju inflasi. Kenaikan BBM dipastikan juga akan mendongkrak laju inflasi di DIY tahun 2005 sebesar 3,77 persen. Dampak kenaikan BBM dan laju inflasi yang begitu tinggi mengakibatkan semakin banyak jumlah penduduk miskin di DIY, melihat secara realita dengan naiknya BBM maka tarif transportasi semakin naik, kenaikan tarif dan kenaikan kebutuhan sehari-hari itu sangat dirasakan oleh penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan.
3. Laju Pertumbuhan Ekonomi = 48186.63

Tanda parameter untuk laju pertumbuhan ekonomi adalah positif signifikan yang berarti angkanya 48186.63 menunjukkan bahwa apabila laju pertumbuhan ekonomi naik sebesar 1%, maka akan menyebabkan naiknya jumlah penduduk miskin

sebesar 48.187.63 jiwa dengan asumsi variabel yang lainnya tetap (*Ceteris Paribus*). Hasil diatas tidak sesuai dengan hipotesis dikarenakan ada beberapa faktor dan alasan yaitu ketimpangan distribusi pendapatan, Todaro, (1987) pada dasarnya konsep kemiskinan dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara baik. Bila pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan minimum, maka orang dapat dikatakan miskin. Dengan demikian, kemiskinan diukur dengan memperbandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin atau sering disebut sebagai garis batas kemiskinan. Konsep ini sering disebut dengan kemiskinan absolut. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup.



## **BAB VII**

### **SIMPULAN DAN IMPLKASI**

#### **7.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan bertolak dari permasalahan penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 1987-2003, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat penyerapan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Prop DIY, hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas  $< 0.05$  dengan nilai 0.0003.
2. Laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Prop DIY, hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas  $< 0.05$  dengan nilai 0.0262.
3. Inflasi dalam penelitian ini tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Prop DIY, hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas  $> 0.05$  dengan nilai 0.6944.
4. Secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Dari hasil estimasi dapat diketahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin, dengan urutan dari variabel sangat berpengaruh hingga variabel yang pengaruhnya lebih kecil adalah penyerapan tingkat tenaga kerja, laju pertumbuhan ekonomi, dan yang berpengaruhnya sangat kecil atau tidak ada pengaruhnya yaitu inflasi.

5. Variabel-variabel independen yang digunakan pada penelitian ini dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 82.1847, sisanya 17.8153 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disertakan pada penelitian ini.
6. Hasil uji asumsi klasik terhadap model regresi menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala Autokorelasi, Multikolinearitas, dan Heterokedastisitas.

## **7.2. Implikasi**

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan didepan, ada beberapa implikasi dari uraian diatas sebagai berikut:

1. Distribusi penduduk yang tidak merata di pulau Jawa khususnya di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta membuat kosentrasi kemiskinan semakin meningkat, diharapkan Pemda DIY mampu menarik investor baik dari dalam maupun luar negeri sehingga mampu menyerap tenaga kerja dan membuka lapangan pekerjaan dan tingkat kemiskinan dapat berkurang.
2. Laju Pertumbuhan Ekonomi yang lambat membuat penyerapan Tenaga Kerja dalam perekonomian DI Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta semakin sedikit, sehingga pengangguran semakin banyak yang pada akhirnya atau ujungnya bermuara pada kemiskinan. Laju pertumbuhan ekonomi seharusnya merata dan stabil sehingga dapat mengurangi penduduk miskin.
3. Pemerintah daerah Yogyakarta dan BI cabang yogyakarta harus menjaga kestabilan perekonomian dan keamanan maka dapat mengakibatkan tingkat inflasi stabil sehingga tingkat kemiskinan dapat berkurang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln, 1988, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Ketiga, Bagian Penerbitan STIE YKPN Yogyakarta.
- Hakim, Abdul, 2002, *Ekonomi Pembangunan*, EKONISIA, Yogyakarta.
- Irawan dan Suparmoko, 1990, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Keenam, BPFE, Yogyakarta.
- Jamli, Ahmad, 1996, *Teori Ekonomi Makro*. Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta
- Kuncoro, Mudrajad, 1997, *Ekonomi Pembangunan Teori, masalah, dan kebijakan*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Muhammad, Wijaya Faried, 1989, *Ekonomikamakro*, Edisi Ketiga, BPFE, Yogyakarta.
- Rahmadi, Ahmad, 2005, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pergeseran Fungsi Lahan Pertanian (Padi) Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi Sarjana (Tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Sukirno, Sadorno, 1994, *Pengantar Teori Makroekonomi*, Edisi Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Todaro, Michael P, 2000, *Ekonomi Pembangunan di Dunia Ketiga*, Edisi Ketujuh, Erlangga, Jakarta.
- Widarjono, Agus, 2005, *Ekonometrika Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis*, EKONISIA, Yogyakarta.

# LAMPIRAN

Data Sebelum di Olah

Jumlah Penduduk Miskin, Tenaga Kerja, Inflasi, Laju Pertumbuhan  
Ekonomi Di Propinsi DIY.

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin(jiwa)	Tenaga Kerja(jiwa)	Inflasi(%)	Laju Pertumbuhan Ekonomi(%)
1987	1093700	1539582	10.37	4.08
1988	1131775	1557231	4.43	6.00
1989	1197850	1587267	5.21	6.27
1990	1207925	1535884	10.73	4.57
1991	1246000	1571361	8.38	5.19
1992	1284075	1594028	4.78	6.94
1993	1322150	1546471	10.01	6.40
1994	1360225	1589905	8.55	8.11
1995	1398300	1491917	9.64	8.09
1996	1436375	1513978	3.05	7.80
1997	1474450	1556268	12.72	3.51
1998	1512525	1579660	76.43	11.18
1999	789100	1624079	2.51	0.99
2000	1035800	1724775	7.32	5.03
2001	767600	1699175	12.56	3.37
2002	635600	1734114	12.01	4.02
2003	636800	1764007	5.13	4.09

Sumber : Badan Pusat Statistik Prop DIY

Hasil Regresi Jumlah Penduduk Miskin, Tenaga Kerja, Inflasi,  
Laju Pertumbuhan Ekonomi

Dependent Variable: JPM  
Method: Least Squares  
Date: 09/06/05 Time: 01:07  
Sample: 1987 2003  
Included observations: 17

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4484288.	790684.5	5.671399	0.0001
TK	-2.260710	0.464106	-4.871105	0.0003
INFLASI	991.1783	2466.916	0.401788	0.6944
LPE	48186.63	19207.98	2.508678	0.0262
R-squared	0.821847	Mean dependent var	1148838.	
Adjusted R-squared	0.780734	S.D. dependent var	285920.0	
S.E. of regression	133884.4	Akaike info criterion	26.64966	
Sum squared resid	2.33E+11	Schwarz criterion	26.84572	
Log likelihood	-222.5222	F-statistic	19.99027	
Durbin-Watson stat	1.953595	Prob(F-statistic)	0.000038	

*Data Setelah diOlah*

Hasil Autokorelasi dengan Lag 1, tidak ada penyakit asumsi Klasik, karena Probabilitas > 0.05

**Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:**

F-statistic	0.006207	Probability	0.938504
Obs*R-squared	0.008788	Probability	0.925312

**Test Equation:**

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 09/06/05 Time: 23:16

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9920.097	832337.6	0.011918	0.9907
INFLASI	212.8006	3726.328	0.057107	0.9554
LPE	-253.6309	20244.75	-0.012528	0.9902
TK	-0.006818	0.490626	-0.013898	0.9891
RESID(-1)	-0.036124	0.458533	-0.078782	0.9385
R-squared	0.000517	Mean dependent var	4.30E-10	
Adjusted R-squared	-0.332644	S.D. dependent var	120681.7	
S.E. of regression	139315.2	Akaike info criterion	26.76679	
Sum squared resid	2.33E+11	Schwarz criterion	27.01186	
Log likelihood	-222.5178	F-statistic	0.001552	
Durbin-Watson stat	1.933937	Prob(F-statistic)	0.999994	

*Data Setelah diOlah*

Hasil Uji Heterokedestisitas, tidak ada penyakit Asumsi

Klasik(Heterokedastisitas), katena probabilitasnya > 0.05

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	0.452875	Probability	0.827677
Obs*R-squared	3.632332	Probability	0.726288

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 09/06/05 Time: 01:10

Sample: 1987 2003

Included observations: 17

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	2.96E+11	3.75E+12	0.078949	0.9386
TK	-308055.5	4574020.	-0.067349	0.9476
TK^2	0.079572	1.396385	0.056984	0.9557
INFLASI	2.90E+09	3.19E+09	0.909997	0.3842
INFLASI^2	-30774540	46207349	-0.666010	0.5205
LPE	-3.90E+08	1.87E+10	-0.020919	0.9837
LPE^2	-3.59E+08	1.88E+09	-0.191545	0.8519
R-squared	0.213667	Mean dependent var		1.37E+10
Adjusted R-squared	-0.258133	S.D. dependent var		2.60E+10
S.E. of regression	2.92E+10	Akaike info criterion		51.32666
Sum squared resid	8.54E+21	Schwarz criterion		51.66975
Log likelihood	-429.2766	F-statistic		0.452875
Durbin-Watson stat	2.040929	Prob(F-statistic)		0.827677

Data Setelah diOlah



Hasil Uji Multikolinearitas dengan uji korelasi menunjukkan bahwa tidak ada penyakit asumsi Klasik(multikolinearitas), karena korelasi antar variable  $< 0,8$

	JPM	INFLASI	LPE	TK
JPM	1.000000	0.324809	0.699357	-0.811835
INFLASI	0.324809	1.000000	0.566981	-0.059958
LPE	0.699357	0.566981	1.000000	-0.411639
TK	-0.811835	-0.059958	-0.411639	1.000000

*Data Setelah diOlah*

## HASIL UJI LINIERITAS DATA

### Ramsey RESET Test:

F-statistic	2.997606	Probability	0.108991
Log likelihood ratio	3.790727	Probability	0.051537

### Test Equation:

Dependent Variable: JPM

Method: Least Squares

Date: 10/12/05 Time: 12:41

Sample: 1987 2003

Included observations: 17

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13755263	5405101.	2.544867	0.0257
TK	-7.561194	3.091800	-2.445564	0.0308
INFLASI	4562.711	3087.141	1.477973	0.1652
LPE	181313.3	78943.63	2.296745	0.0404
FITTED^2	-1.14E-06	6.59E-07	-1.731360	0.1090
R-squared	0.857455	Mean dependent var	1148838.	
Adjusted R-squared	0.809939	S.D. dependent var	285920.0	
S.E. of regression	124649.5	Akaike info criterion	26.54433	
Sum squared resid	1.86E+11	Schwarz criterion	26.78939	
Log likelihood	-220.6268	F-statistic	18.04591	
Durbin-Watson stat	1.435212	Prob(F-statistic)	0.000052	

Sumber : data diolah

Dari Hasil uji terlihat bahwa data dalam penelitian ini cukup linier karena Probabilitasnya  $> 0,05$  sehingga bisa dikatakan data dalam penelitian ini linier secara ekonometrik.

## UJI MWD

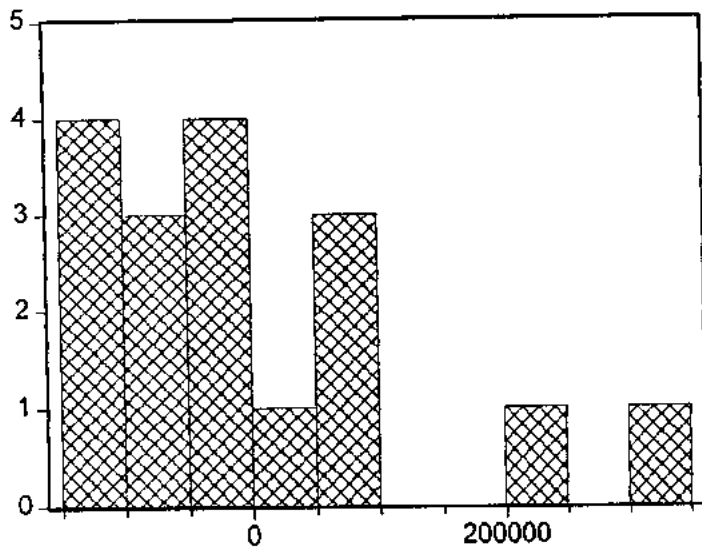
Dependent Variable: Y  
Method: Least Squares  
Date: 12/10/05 Time: 20:40  
Sample: 1987 2003  
Included observations: 17

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-48865514	20992176	-2.327797	0.0382
X1	31.17985	13.09688	2.380708	0.0347
X2	-17613.74	21835.32	-0.806663	0.4356
X3	238789.1	176024.0	1.356572	0.1999
Z1	-7234055.	3812895.	-1.897260	0.0821
R-squared	0.371027	Mean dependent var	1485968.	
Adjusted R-squared	0.161370	S.D. dependent var	1283387.	
S.E. of regression	1175284.	Akaike info criterion	31.03185	
Sum squared resid	1.66E+13	Schwarz criterion	31.27691	
Log likelihood	-258.7707	F-statistic	1.769681	
Durbin-Watson stat	1.910892	Prob(F-statistic)	0.199746	

Dependent Variable: LY  
Method: Least Squares  
Date: 12/10/05 Time: 20:40  
Sample: 1987 2003  
Included observations: 17

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-207.1291	246.1135	-0.841600	0.4165
LX1	15.47168	17.24206	0.897322	0.3872
LX2	-0.165626	0.189677	-0.873197	0.3997
LX3	0.506741	0.325465	1.556976	0.1454
Z2	1.50E-06	1.95E-06	0.770680	0.4558
R-squared	0.177934	Mean dependent var	14.05498	
Adjusted R-squared	-0.096088	S.D. dependent var	0.482551	
S.E. of regression	0.505203	Akaike info criterion	1.712214	
Sum squared resid	3.062757	Schwarz criterion	1.957277	
Log likelihood	-9.553822	F-statistic	0.649341	
Durbin-Watson stat	1.670491	Prob(F-statistic)	0.638128	

### Hasil Uji Normalitas Data (Histogram Normality Test)



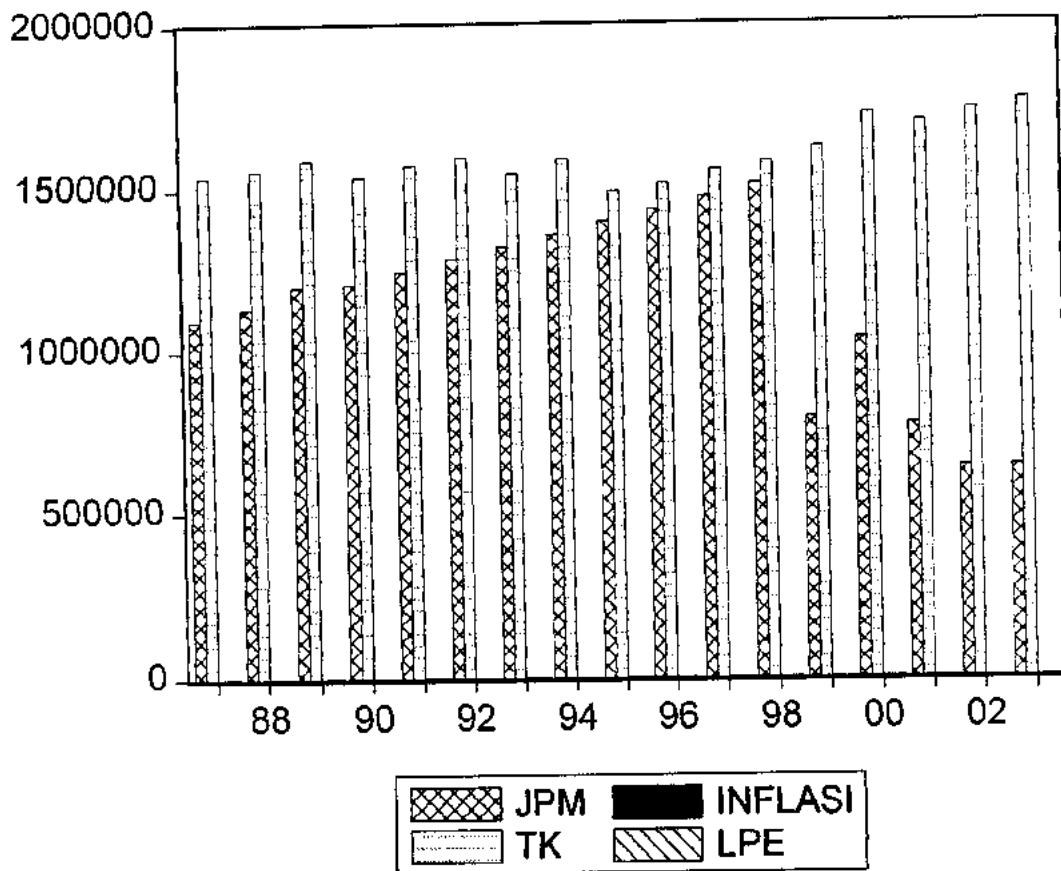
Series: Residuals  
Sample 1987 2003  
Observations 17

Mean	5.09E-10
Median	-15092.01
Maximum	326689.9
Minimum	-133973.4
Std. Dev.	120681.7
Skewness	1.304056
Kurtosis	4.398145

Jarque-Bera	6.202919
Probability	0.044984

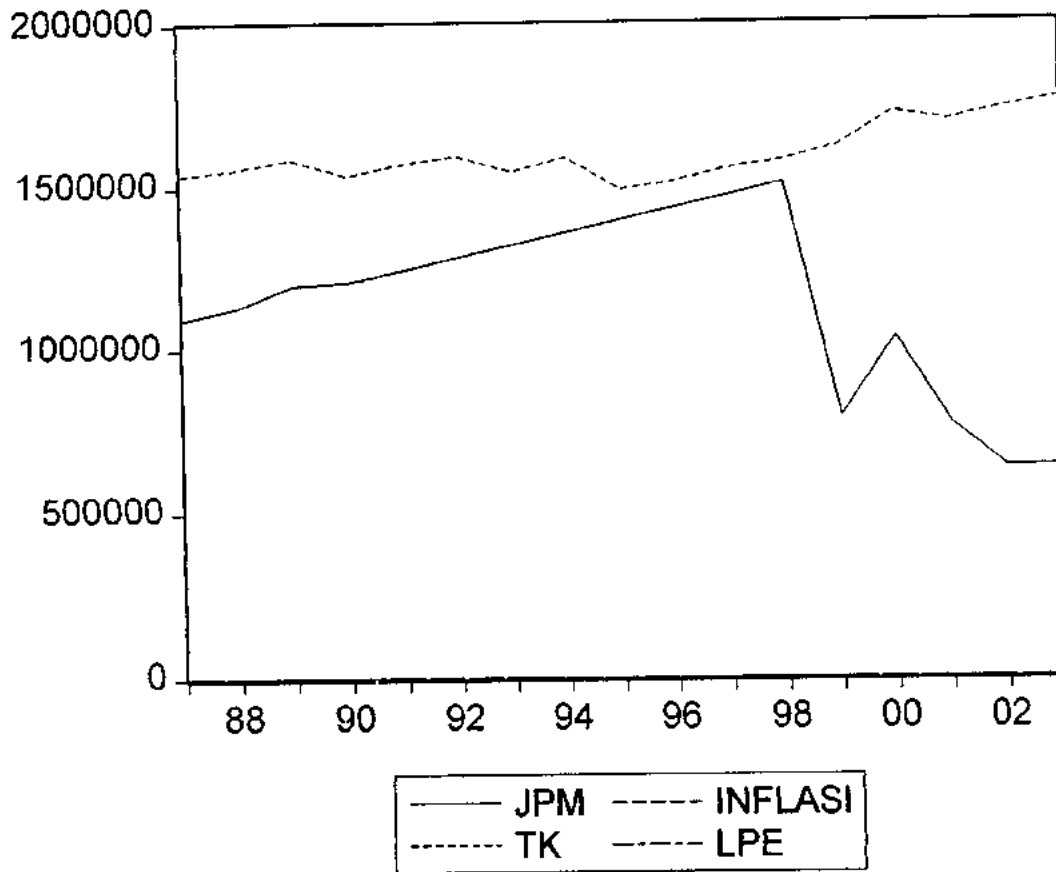
# Grafik Bar (Grafik Balok) Jumlah Penduduk Miskin di Propinsi

D.I.Yogyakarta Periode 1987-2003

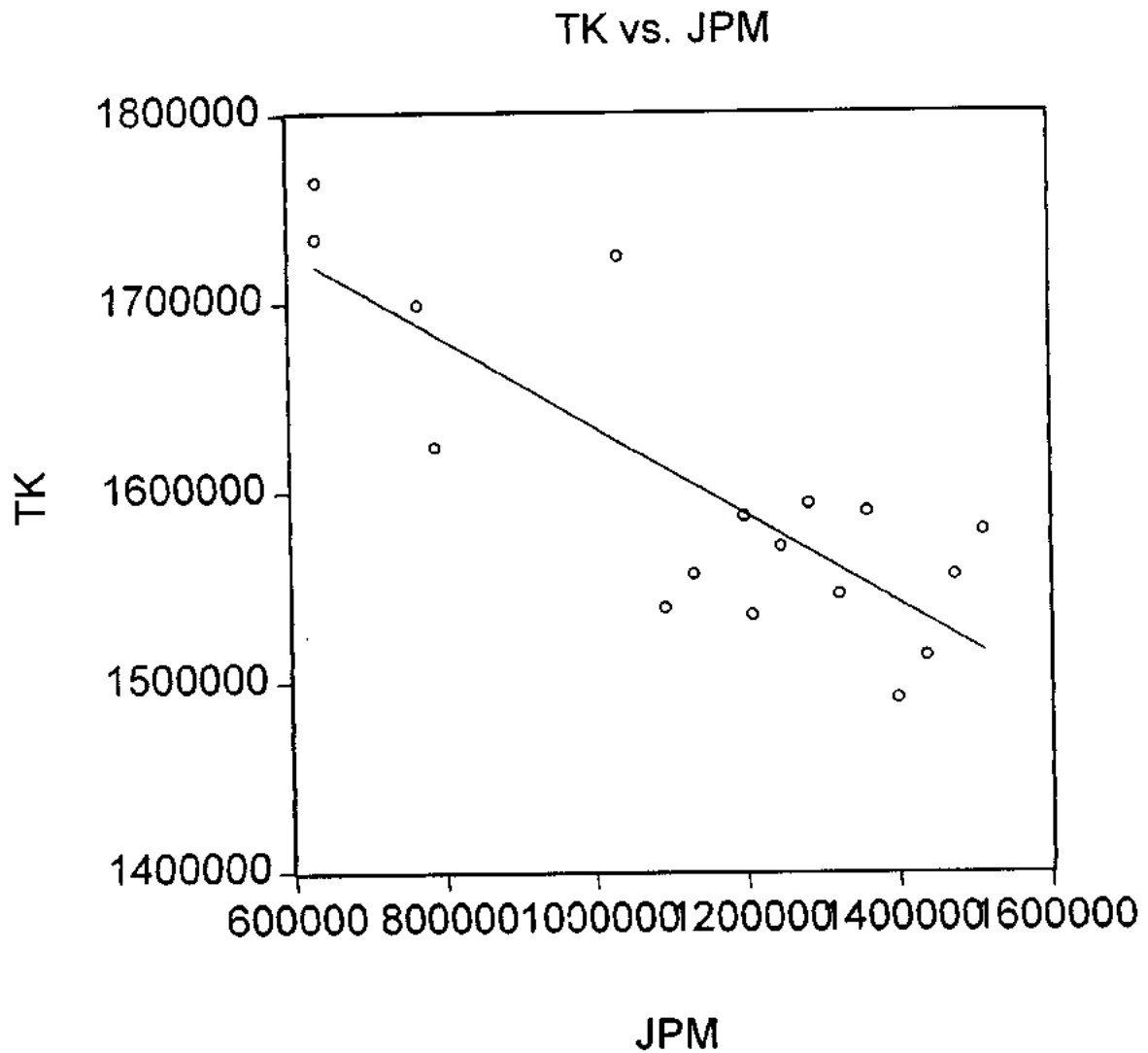


**Grafik Line (Grafik Garis) Jumlah Penduduk Miskin di Propinsi**

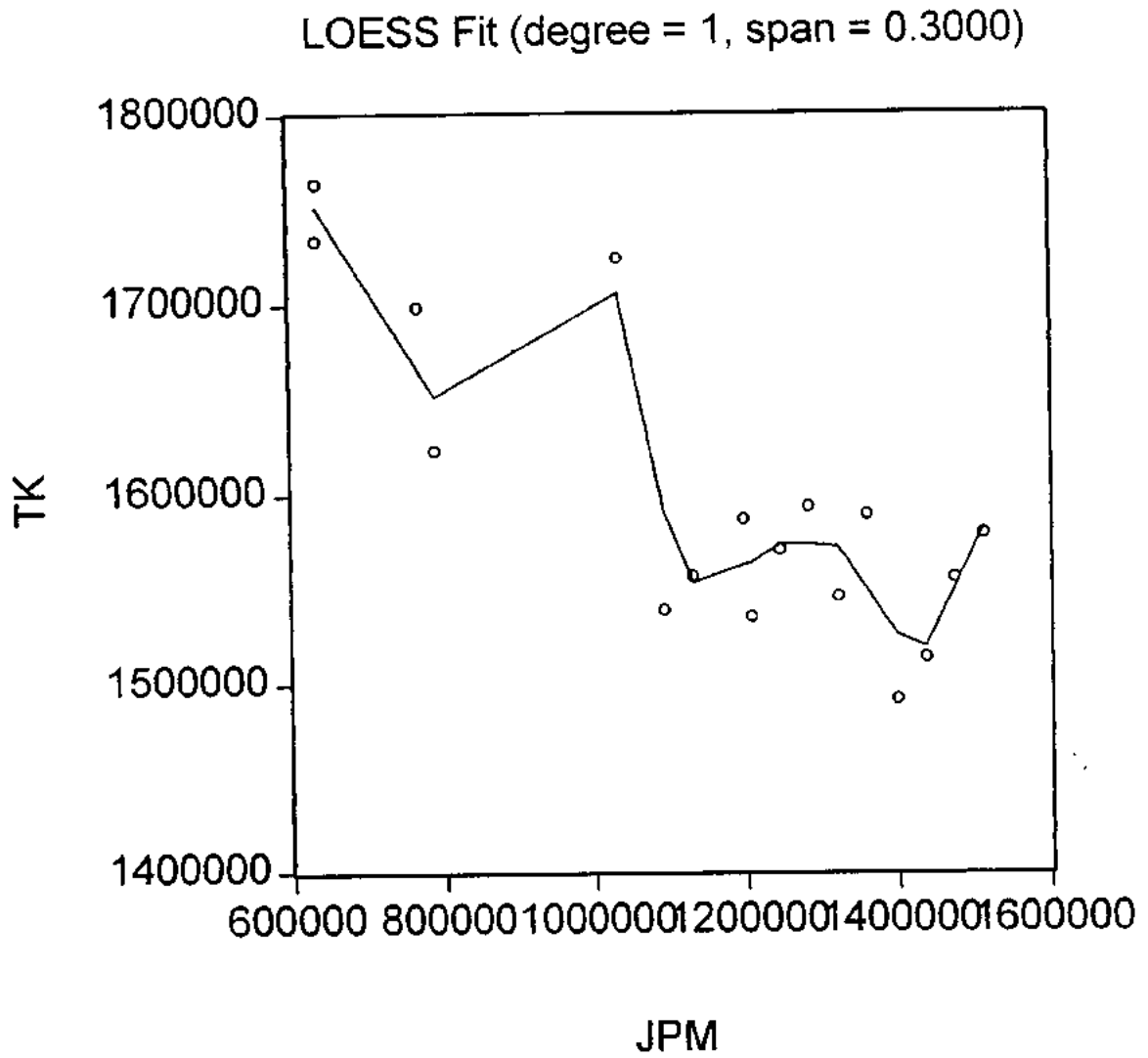
**D.I.Yogyakarta Periode 1987-2003**



Grafik Scatter With Regression (Jumlah Sebaran Data di Sekitar Garis Regresi) Data Jumlah Penduduk Miskin Di Propinsi D.I. Yogyakarta Periode 1987-2003



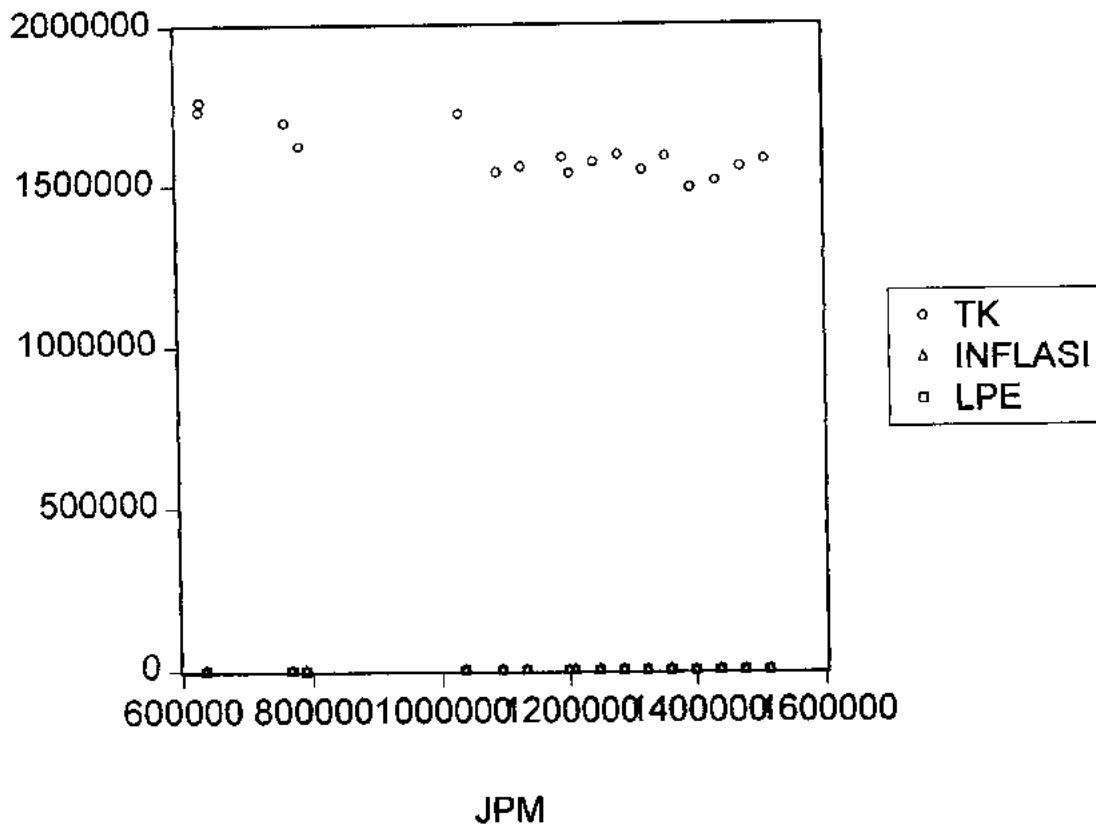
Grafik Scatter With Nearest Neighbor Fit (Garis Kemencengan Data Regresi) Data Jumlah Penduduk Miskin Di Propinsi D.I. Yogyakarta Periode 1987-2003



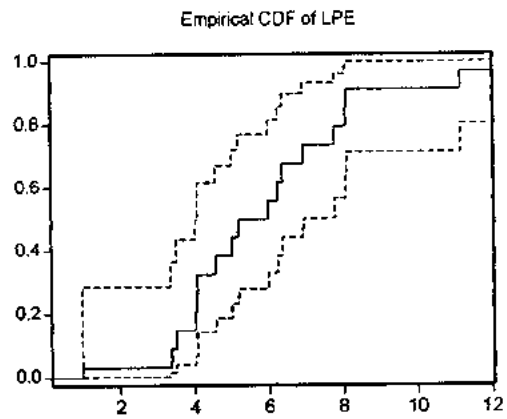
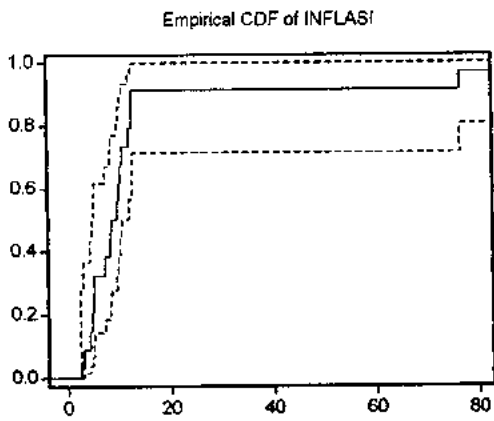
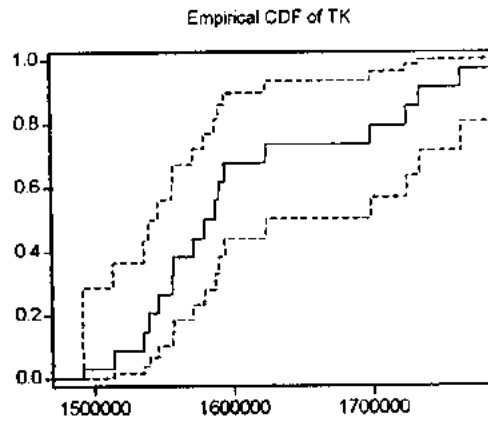
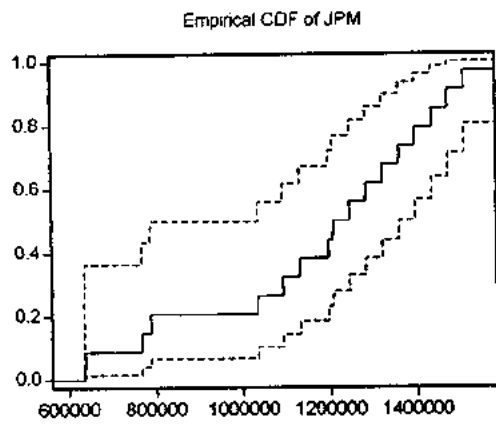


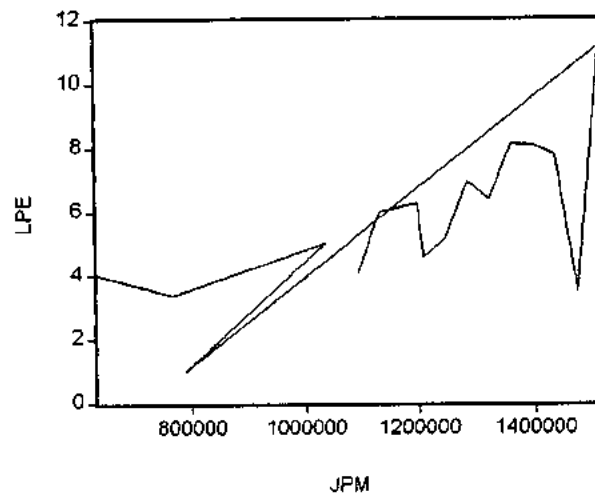
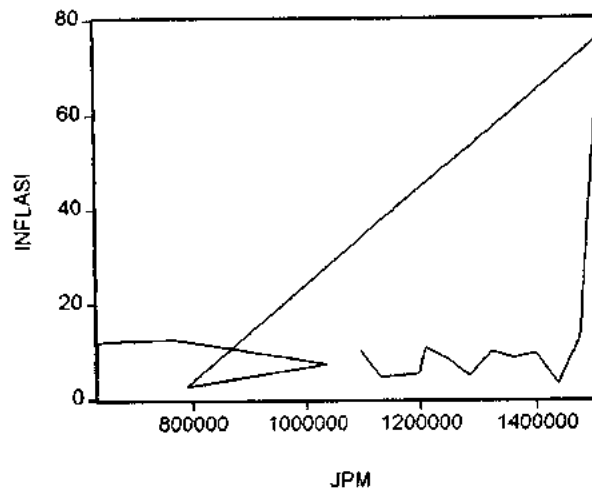
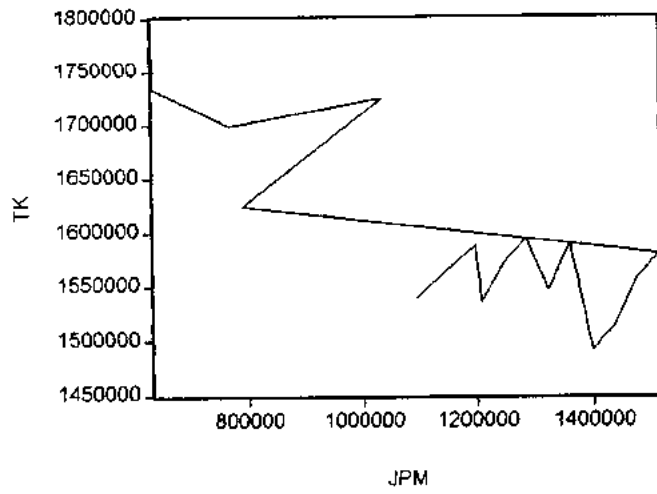
# Grafik Simple Scatter Data Jumlah Penduduk Miskin Di

## Propinsi D.I. Yogyakarta



**Grafik Distribusi Data Jumlah Penduduk Miskin, Tenaga Kerja, Inflasi dan  
Laju Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi D.I. Yogyakarta  
Periode 1987-2003**





**Cross Correlogram Data Jumlah Penduduk Miskin dan Tenaga Kerja di  
Propinsi D.I. Yogyakarta Periode 1987-2003**

Date: 10/12/05 Time:  
13:17

Sample: 1987 2003

Included observations: 17

Correlations are asymptotically consistent approximations

JPM,TK(-i)	JPM,TK(+i)	i	lag	lead
*****	*****	0	-0.8118	-0.8118
*****	*****	1	-0.7105	-0.6941
*****	***	2	-0.5654	-0.3250
***	*	3	-0.3190	-0.0759
.	*	4	0.0162	0.0740
.	****	5	0.0475	0.3858
.	****	6	0.2034	0.3551
.	***	7	0.1436	0.3209
.	***	8	0.1006	0.2936
.	**	9	0.0694	0.2392
.	**		0.0502	0.1808
.		10		
.	*		0.1019	0.1283
.		11		
.	*		0.2152	0.0677
.		12		
.	**		0.1703	0.0206
.		13		
.	*		0.1406	0.0008
.		14		
.	*		0.1438	-0.0273
.		15		

Sumber: Data Diolah

## Correlogram Data Jumlah Penduduk Miskin Di Propinsi D.I. Yogyakarta

**Periode 1987-2003**

Date: 10/12/05 Time: 13:14

Sample: 1987 2003

Included observations: 17

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob	
*****	*****	1	0.634	0.634	8.1258	0.004
***	***	2	0.441	0.064	12.308	0.002
*	**	3	0.183	-0.201	13.079	0.004
.	*	4	-0.030	-0.165	13.102	0.011
**	***	5	-0.319	-0.346	15.844	0.007
**	*	6	-0.305	0.153	18.573	0.005
**	*	7	-0.284	0.070	21.177	0.004
**	*	8	-0.255	-0.118	23.513	0.003
**	*	9	-0.218	-0.117	25.424	0.003
*	**		-0.186	-0.227	27.025	0.003
.	.	10				
*	*		-0.123	0.072	27.842	0.003
.	.	11				
*	*		-0.059	0.116	28.066	0.005
.	.	12				
.	*		-0.033	-0.098	28.152	0.009
.	.	13				
.	*		0.004	-0.086	28.153	0.014
.	.	14				
.	*		0.028	-0.143	28.283	0.020
.	.	15				

Sumber: Data Diolah